

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN TENAGA
KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI
DI PULAU SUMATERA**

(TESIS)

Oleh

Taufiqur Rahman



JURUSAN MAGISTER ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2018

ABSTRACT

EFFECT OF FISCAL DECENTRALIZATION AND LABOR ON ECONOMIC GROWTH IN PROVINCE IN SUMATERA ISLAND

By

TAUFIQUR RAHMAN

Fiscal decentralization and economic growth are the two main issues that continue to be discussed. Both of these topics are not resolved in view of the important relationship between the two. The relationship is more specifically examined in the economic sphere of whether fiscal decentralization has a positive or negative effect on economic growth. Indeed, from various studies on fiscal decentralization and economic growth that have been done before there are different results. This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization and labor on the economic growth of the province on the island of Sumatra partially and wholly.

The data used in the study is secondary data for the period 2011-2015. Hypothesis testing is done by Data Panel Regression Analysis method by using Eviews 9.0 program to analyze the influence of Fiscal Decentralization and Labor on Economic Growth Province in Sumatera Island. The test used is chow test, hausman test, t test and F test.

The result of data analysis shows that Fiscal Decentralization of Expenditure side, Fiscal Decentralization of Revenue and Labor side have positive and significant influence to Economic Growth Province in Sumatera Island. Partially, Fiscal Decentralization of Expenditure and Labor Affects Positive and Significant Effect on Economic Growth of Province in Sumatera Island. While Decentralization of Revenue side have positive but not significant influence to Economic Growth Province in Sumatera Island.

Keywords: Fiscal Decentralization, Labor, Economic Growth, and Panel Data.

ABSTRAK

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI DI PULAU SUMATERA

Oleh

TAUFIQUR RAHMAN

Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua bahasan utama yang terus menjadi pembahasan. Kedua topik ini seperti tidak habis diteliti mengingat hubungan penting antara keduanya. Hubungan tersebut lebih spesifik diteliti dalam ranah ekonomi yaitu apakah desentralisasi fiskal berpengaruh positif ataukah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Memang dari berbagai penelitian mengenai desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang telah dilakukan sebelumnya terdapat hasil yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera secara parsial dan keseluruhan.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder periode 2011-2015. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode Analisis Regresi Data Panel dengan menggunakan program *Eviews 9.0* untuk menganalisis pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera. Uji yang digunakan adalah uji chow, uji hausman, uji t dan uji F.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal sisi Pengeluaran, Desentralisasi Fiskal sisi Pendapatan dan Tenaga Kerja secara bersama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera. Secara parsial, Desentralisasi Fiskal sisi Pengeluaran, dan Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera. Sedangkan Desentralisasi sisi Pendapatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera

**Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi,
dan Data Panel.**

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN TENAGA KERJA
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI DI PULAU
SUMATERA**

Oleh

Taufiqur Rahman

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER EKONOMI**

Pada

**Jurusan Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Tesis : **PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI DI PULAU SUMATERA**

Nama Mahasiswa : **Taufiqur Rahman**

No. Pokok Mahasiswa : 1421021007

Konsentrasi : **Pembangunan dan Keuangan Daerah**

Jurusan : **Magister Ilmu Ekonomi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si
NIP 19611209 198803 1 003



Dr. Arivina Ratih Taher, S.E., M.M
NIP 19800705 200604 2 002

MENGETAHUI

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si
NIP 19611209 198803 1 003

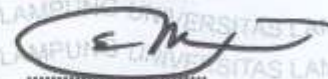
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

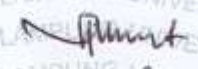
Ketua Penguji (Pembimbing I) : Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si



Penguji I : Dr. Marselina Djayasinga, S.E., M.P.M



Penguji II : Dr. Hi. Toto Gunarto, S.E., M.Si



Sekretaris Penguji (Pembimbing II) : Dr. Arivina Ratih Taher, S.E., M.M



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



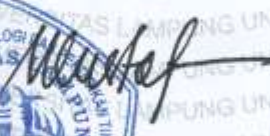
Prof. Dr. H. Satya Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP. 19610904 198703 1 011



3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Drs. Mustofa, MA., Ph.D.
NIP. 19570101 198403 1 020



Tanggal Lulus Ujian Tesis : 09 April 2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam peraturan akademik atau yang disebut plagiarisme. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku."

Bandar Lampung, 5 April 2018

 Penulis
Taufiqur Rahman

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas segala rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan Allah SWT, kupersembahkan karya sederhana ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kepada yang tersayang:

Kedua Orang Tua Tersayang bapak dan ibu, dengan segala limpahan kasih sayang, doa, keikhlasan, ketulusan, kesabaran dan pengorbanan yang selalu diberikan dari aku kecil hingga dewasa yang sampai kapanpun tidak mungkin bisa terbalaskan walaupun dengan seisi dunia sekalipun.

Saudaraku Tersayang Nuraini Fajri (Alm), Kurnia Rahmawati, Roida Alifah, dan Khoirani Fajrina serta keponakan Tersayang Muhammad Rafa Azka yang selalu menjadi penghibur dan penyemangat untuk diriku.

Untuk seseorang wanita bernama Raden Roro Yenni Nurmala yang Insya Allah akan menjadi pendamping hidupku kelak apabila diberikan nikmat usia untuk melaksanakannya.

Almamaterku Tercinta

MOTO:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا
مَرَدَّ لَهُ، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya :

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia (QS : Ar-ra'd ayat 11).

Awal yang seperti apa pun buruknya akan dimaafkan jika hari ini engkau hidup dengan baik, dan masa depan yang tidak pasti seperti apa pun akan menjadi baik jika engkau hidup setiap hari dengan lebih baik daripada kemarin.

(Taufiqur Rahman)

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Ogan Komering Ulu pada tanggal 25 Juli 1991. Sebagai anak pertama dari lima bersaudara, buah cinta dari pasangan Bapak Hi. Supaijo, S.H,M.H. dan Ibu Hj. Rusmini.

Pendidikan yang penulis tempuh Sekolah Dasar Al-Azhar 1 Perumnas Way Halim Bandar Lampung yang telah diselesaikan pada tahun 2003. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Bandar Lampung yang telah diselesaikan pada tahun 2006. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Bandar Lampung yang telah diselesaikan pada tahun 2009.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Jurusan Ekonomi Pembangunan pada tahun 2009 melalui jalur Penerimaan Khusus Akademik dan Bakat (PKAB) dan telah menyelesaikan pendidikan pada tahun 2014.

Pada bulan Mei tahun 2011 penulis melaksanakan Kuliah Kunjung Lapangan (KKL) di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas). Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Januari-Februari tahun 2012 selama 40 hari di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S-2 Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2014 melalui jalur penerimaan mandiri.

SANWACANA

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-nya serta shalawat serta salam tidak lupa saya haturkan kepada junjungan saya Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Pulau Sumatera” Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ekonomi pada program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis telah banyak menerima bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati sebagai wujud rasa hormat dan penghargaan serta terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si. selaku Pembimbing Utama dan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran dalam proses perkuliahan, konsultasi masalah perkuliahan dari awal hingga akhir serta proses penyusunan tesis ini hingga akhir kepada penulis.

2. Ibu Dr. Arivina Ratih Taher, S.E, M.M selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran dalam proses penyusunan tesis ini hingga akhir kepada penulis.
3. Ibu Dr. Marselina Djayasinga, S.E, M.P.M selaku Penguji Utama yang memberikan saran dan masukan yang konstruktif kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Dr. Hi. Toto Gunarto, S.E, M.Si selaku Penguji Kedua yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E, M.Si. selalu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E, M.Si. selaku Ketua Jurusan Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung.
7. Bapak Imam Awaluddin, S.E, M.Si. sebagai dosen yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.
9. Mas Bolang, Bapak Sahidin, Mbak Wanti dan Mbak Sheila yang telah membantu dalam proses penyelesaian penyusunan tesis ini.
10. Kedua orang tua tersayang Supaijo dan Rusmini, yang selalu memberikan doa, kasih sayang dan dukungan, serta saudara kandungku Nuraini Fajri (Alm), Kurnia Rahmawati, Roida Alifah, dan Khoirani Fajrina atas semangat yang diberikan. Keponakan tersayang Muhammad Rafa Azka yang menjadi penghibur dan penyemangat.

11. Mbah Masringah, Mbah Jalal, Mbah Saminem (Alm), Mbah Parto Suwito (Alm), Pakde Dalno, Pakde Suparmin, Pakde Rohmadi, Om Muhajir, S.Pt, Tante Yana, Tante Ika, Tante Rusmiati, Om Jono, Om Idham, mas hendra, mas arif, Ginanjar, Dian, Danndi, Yoganata, Tiara, Algan, Nadiva, Mas Wawan, Bude Mar, Mbak Pipit, Mbak Win yang telah memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan semangat yang diberikan.
12. Orang yang sangat spesial dalam hidup saya selama ini yang menemaniku dengan kesetiaan, kerendahan hati, ketulusan, kesabaran, pengorbanan, perhatian, kasih sayang, waktu dan kebersamaan selama enam tahun ini, RR Yenni Nurmala saya ucapkan terimakasih.
13. Sahabat satu bimbingan program pascasarjana MIE Aditia Rinaldi, Devi, Mas Yoga, Mas Rizki, dan Fredyansyah yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
14. Sahabat-sahabatku sarjana Habriandi Bukit, Suhezar Koko Wijaya, Renita K Allagan, Maria Magdalena, Lintang Puspita Sari, Apri Anita Sari, dan Nurul Fatimah yang telah memberikan pengalaman, support dan doa dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
15. Sahabat-sahabat KKN Andi, Vito, Gede, Oka, Ilham, Icha, Soimah, Yulida, Nadra yang telah memberikan pengalaman serta kebersamaan yang luar biasa selama masa KKN.
16. Sahabat-sahabat SMA tersayang Ragil, Tatang, Opi, Deki, Nara, Ponco, Sidarta, Panji, Danepo, Tedy, Farid, Sandez, Abrori, Dede Apriyawan, Andri Triarham Ansory (Alm), Doni, Dhana, Alan, Henov, Angga, Syandri, Harun, Nara, Ridho, Gibran Sesunan, Iqbal, Ajie, Iben yang telah

memberikan pengalaman serta kebersamaan yang luar biasa saat kita menjalani masa-masa paling indah dalam hidup yaitu masa SMA.

17. Teman-teman Ekonomi Pembangunan angkatan 2009 konsentrasi Ekonomi Publik dan Fiskal Yenni, Renita, Andre, Ucil, Eki, Adis, Poppy, Ncay, Mira, Ridho, Ryan, Ezar atas kebersamaan selama menjalani perkuliahan.
18. Teman-teman Ekonomi Pembangunan angkatan 2009 Atin, Meri, Tiya, , Ari, Rido, Rulio, Jaya, Dodoy, Mediansyah, Yuri, Aci serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
19. Teman-teman MASUM tersayang Affuad Ridho Fahmi, Ryan Andrey Doloksaribu, Suhezar Koko Wijaya, M. Lazuardi Andrian, Aditia Rinaldi, Bangun Parulian Sitorus, Andry Dwi Ichwanto, Taufiqurrahman, dan Andre Avatara atas bantuan , support dan persahabatan selama masa perkuliahan ini.
20. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan pengorbanan, serta Rasulullah Muhammad SAW memberikan syafa'atnya di yaumul kiyamah kelak kepada bapak, ibu, kakak, adik, dan teman-teman. Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi penulis berharap semoga karya ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, April 2018

Penulis

Taufiqurrahman

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	28
C. Tujuan Penelitian.....	29
D. Manfaat Penelitian.....	29
II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	30
1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar.....	30
2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik.....	32
B. Tenaga Kerja.....	33
1. Angkatan Kerja.....	33
2. Bukan Angkatan Kerja.....	34
C. Kebijakan Fiskal.....	35
D. Desentralisasi Fiskal.....	36
E. Otonomi Daerah.....	37
F. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	39
1. Pengertian APBD.....	39
2. Fungsi APBD.....	40
a. Fungsi Otorisasi.....	40

b. Fungsi Perencanaan.....	40
c. Fungsi Pengawasan.....	40
d. Fungsi Alokasi.....	41
e. Fungsi Distribusi.....	41
f. Fungsi Stabilitas.....	41
3. Kebijakan APBD.....	41
a. Kebijakan APBD Defisit.....	41
b. Kebijakan APBD Surplus.....	42
c. Kebijakan APBD Berimbang.....	42
G. Teori Pengeluaran Pemerintah.....	43
1. Teori Makro.....	43
a. Model Rostow dan Musgrave.....	44
b. Model Wagner.....	45
c. Model Peacock dan Wiseman.....	46
2. Teori Mikro.....	47
H. Sumber Penerimaan Daerah.....	48
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	48
2. Dana Perimbangan.....	48
3. Pinjaman Daerah.....	50
4. Lain-lain Pendapatan yang Sah.....	51
I. Belanja Daerah.....	51
1. Belanja Administrasi Umum.....	52
2. Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik.....	53
3. Belanja Modal.....	54
4. Belanja Transfer.....	54
5. Belanja tak Tersangka.....	55
J. Kajian Penelitian Sebelumnya.....	56
K. Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis.....	59
1. Pengaruh Desentralisasi Fiskal sisi Pengeluaran terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	59
2. Pengaruh Desentralisasi Fiskal sisi Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	62
3. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	66
L. Kerangka Pemikiran.....	67
M. Hipotesis.....	69

III. METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian.....	70
B. Jenis dan Sumber Data.....	70
C. Variabel Operasional dan Pengukurannya.....	71
1. Pertumbuhan Ekonomi.....	71
2. Desentralisasi Fiskal Pengeluaran.....	72
3. Desentralisasi Fiskal Pendapatan.....	72
4. Tenaga Kerja.....	72
D. Analisis Data.....	73
1. Model Analisis.....	73
a. Data Panel.....	73
b. Model Pendekatan Data Panel.....	75
1. Pendekatan <i>Common Effect</i>	75
2. Pendekatan <i>Fixed Effect</i>	76
3. Pendekatan <i>Random Effect</i>	77
c. Pemilihan Teknik Pendekatan Data Panel.....	78
1. Uji Chow.....	78
2. Uji Hausman.....	79
d. Estimasi Model Regresi Data Panel.....	80
2. Pengujian Data.....	81
a. Uji Asumsi Klasik.....	81
b. Uji Hipotesis.....	83
1. Uji t (Keberartian Parsial).....	83
2. Uji F (Keberartian Keseluruhan).....	85
c. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	86
d. Interpretasi Koefisien Data Panel.....	87
E. Gambaran Umum.....	87
1. Geografis.....	87
2. Administratif.....	88

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	90
1. Desentralisasi Fiskal.....	91
a. Rasio Pengeluaran Daerah.....	91
b. Rasio Kemandirian Daerah.....	92
2. Tenaga Kerja.....	93
3. Pertumbuhan Ekonomi.....	94

B. Hasil Uji Metode Pendekatan data Panel.....	95
1. Uji Chow.....	95
2. Uji Hausman.....	96
C. Hasil Uji Hipotesis.....	96
1. Hasil Uji t (Keberartian Parsial).....	96
a. Hasil Uji Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen.....	97
2. Hasil Uji F (Keberartian Keseluruhan).....	98
D. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	99
E. Intepretasi Koefisien <i>Fixed Effect</i>	100
F. Pembahasan Hasil Penelitian.....	101
1. Pengaruh Rasio Pengeluaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	102
2. Pengaruh Rasio Kemandirian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	102
3. Pengaruh Rasio Tenaga Kerja Berijazah SMA/Sederajat terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	103
4. Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	104
5. Analisis Hubungan Kemandirian Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	112
6. Analisis Hubungan Tenaga Kerja Dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	125

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	129
B. Saran.....	130

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daerah Otonomi Tingkat Provinsi di Pulau Sumatera.....	16
2. Pendapatan Asli daerah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2015.....	26
3. Penelitian Terdahulu	56
4. Rasio Pengeluaran Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2015	91
5. Rasio Kemandirian Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2015	92
6. Rasio Tenaga Kerja Berijazah SMA terhadap Total Tenaga Kerja Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2015	93
7. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2015	94
8. Hasil Uji Chow	95
9. Hasil Uji Hausman.....	96
10. Hasil Uji t Rasio Pengeluara, Rasio Kemandirian, Rasio Tenaga Kerja.....	97
11. Hasil Uji Koefisien Determinasi	99
12. Koefisien <i>Fixed Effect</i>	100
13. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2015.....	105
14. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2015.....	114
15. Jumlah Tenaga Kerja Berijazah SMA/Sederajat Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2015.....	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Atas Kelompok Wilayah di Indonesia Tahun 2011-2015.....	14
2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2015.....	17
3. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2015.....	18
4. Realisasi Total Pendapatan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2015.....	20
5. Kemandirian Daerah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2015.....	22
6. Total Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2015.....	24
7. Jumlah Penduduk Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2015....	25
8. Jumlah Tenaga Kerja Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2015.....	26
9. Kurva Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner.....	45
10. Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Menurut Peacock dan Wiseman.....	47
11. Kerangka Pemikiran.....	67
12. Komparasi Rasio Pengeluaran dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2015.....	107
13. Komparasi Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2015.....	116

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data yang digunakan	L.1
2. Hasil Regresi Data Panel	L.2

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua bahasan utama yang terus menjadi pembahasan. Kedua topik ini seperti tidak habis diteliti mengingat hubungan penting antara keduanya. Hubungan tersebut lebih spesifik diteliti dalam ranah ekonomi yaitu apakah desentralisasi fiskal berpengaruh positif ataukah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Memang dari berbagai penelitian mengenai desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang telah dilakukan sebelumnya terdapat hasil yang berbeda.

Hasil studi terdahulu yang dilakukan oleh Davodi dan Zou (1998) dan Zhang dan Zou (1998) menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Davodi dan Zou (1998) dalam penelitiannya atas 46 negara maju dan negara berkembang dengan menggunakan analisis data panel dari tahun 1970 sampai 1989 menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju, dan memiliki pengaruh yang negatif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang.

Simpulan yang sama juga diperoleh dari penelitian Zhang dan Zou (1998) dalam penelitiannya di China dengan menggunakan analisis regresi data panel dalam kurun waktu 1978 sampai 1992. Hasil penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil negatif ini dikarenakan tahap perkembangan ekonomi di Cina yang dimana pemerintah pusat terus dibatasi oleh sumber daya untuk investasi publik dalam prioritas nasional.

Hasil penelitian yang berbeda diperoleh dari penelitian Lin dan Liu (2000), Akai dan Sakata (2002), Faridi (2011), serta Patonov (2013). Lin dan Liu (2000) meneliti pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi China periode 1970 sampai 1993. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel, dan temuan yang dihasilkan menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasilnya juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara signifikan dipengaruhi oleh reformasi pedesaan, akumulasi modal dan pengembangan sektor non negara. Pengaruh positif ini disebabkan oleh meningkatnya efisiensi dalam alokasi sumber daya.

Akai dan Sakata (2002) dalam penelitiannya di 50 negara bagian Amerika pada tahun 1992 sampai 1997 dengan menggunakan analisis data panel juga menemukan pengaruh positif dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Pengaruh positif ini disebabkan oleh tidak adanya distorsi pada data yang digunakan dalam permodelan regresi.

Faridi (2011) dalam penelitiannya di Pakistan dengan menggunakan analisis model autoregressive dari tahun 1972 sampai dengan tahun 2009 menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh positif dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya desentralisasi fiskal dapat menciptakan suatu kondisi dimana akan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas dan pelayanan publik karena mekanisme pembangunan telah diserahkan kepada pemerintah provinsi oleh pemerintah pusat.

Patonov (2013) dalam penelitiannya atas 27 negara Uni Eropa dengan menggunakan analisis data panel dari tahun 2000 sampai 2010 menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 27 negara Uni Eropa. pengaruh positif tersebut terwujud karena terjadinya peningkatan efisiensi pengeluaran, peningkatan efisiensi disektor publik dan pengalihan kekuasaan belanja dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat mengkatalisasi pertumbuhan PDB tahunan.

Beberapa penelitian mengenai desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang telah dilakukan guna mendapatkan hasil dari pengaruh desentralisasi fiskal, khususnya dengan menggunakan model ekonometrika ternyata menghasilkan simpulan yang berbeda. Disatu pihak desentralisasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi ((Davodi dan Zou,1998) dan (Zhang dan Zou, 1998)). Sementara dilain pihak terdapat penelitian yang menunjukkan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan

ekonomi sebagaimana hasil dari penelitian Lin dan Liu (2000), Akai dan Sakata (2002), Faridi (2011) serta Patonov (2013).

Awal permulaan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Timur. Namun ketiga undang-undang ini hanyalah konsep saja tanpa adanya implementasi pelaksanaan dari otonomi daerah (Saragih, 2003). Kemudian, antara Tahun 1953 hingga tahun 1962 terjadi sebuah situasi dimana terdapat perselisihan yang terus menerus antara aspirasi kedaerahan dan kebutuhan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang kuat (Kumorotomo, 2008). Hal ini ditandai oleh sejumlah pemberontakan separatis melawan pemerintah pusat di beberapa daerah yakni di Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Makassar, dan Kepulauan Maluku (Kumorotomo, 2008).

Pada tahun 1956, pemerintahan Soekarno mensyahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 Tentang Keuangan Daerah, kemudian pada tahun 1957 pemerintahan Soekarno juga mensyahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Otonomi Daerah. Langkah ini merupakan upaya reformasi mendasar untuk menyeimbangkan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah guna meredakan gerakan pemberontakan di berbagai daerah

dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Otonomi Daerah memberikan kepada Provinsi untuk pertama kalinya, kekuasaan untuk mengawasi jalannya pemerintahan di masing-masing wilayah dengan memberikan kekuasaan kepada DPRD mengenai urusan kedaerahannya (Kumorotomo, 2008).

Undang-undang mengenai desentralisasi fiskal yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 Tentang Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Otonomi Daerah ternyata disahkan bersamaan dengan diberlakukannya kondisi darurat dan tindakan militer untuk menumpas pemberontakan PRRI di Sumatera pada tahun dan Permesta di Sulawesi yang menuntut dilaksanakannya otonomi secara luas (Kumorotomo, 2008). Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit presiden yang menghapuskan sistem demokrasi parlementer dan mengubahnya menjadi demokrasi terpimpin dan pada tahun yang sama juga diterbitkan dan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 Tentang Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat Dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri, Dan Penyerahan Keuangannya Kepada Pemerintah Daerah.

Kebijakan Presiden tersebut membawa kerangka hubungan pusat dan daerah kembali menjadi sangat sentralistis dan para Gubernur Provinsi tetap ditunjuk oleh pemerintah pusat dan berakhirilah eksperimen otonomi daerah dengan perundangan 1957 tersebut dan diikuti oleh tidak adanya niat serius dari pemerintah pusat untuk melaksanakan struktur perimbangan keuangan yang

telah digariskan dalam perundangan tahun 1956 tersebut (Kumorotomo, 2008).

Kemudian pada tahun 1960, terbitlah Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 Tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 dan pada tahun 1965 disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Kedua peraturan tersebut secara jelas telah merumuskan perlunya untuk melaksanakan atau kalau tidak merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 Tentang Keuangan Daerah, tetapi pada akhirnya tidak ada undang-undang baru yang disahkan berkenaan dengan keuangan daerah bahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang telah disahkan menunjukkan kemunduran dalam hal desentralisasi karena undang-undang tersebut mengatur bahwa para pemimpin daerah diangkat oleh pejabat tinggi pemerintah pusat meskipun pencalonannya dilakukan oleh DPRD, serta Bupati dan Badan Pemerintah Harian (BPH) diangkat oleh Menteri Dalam Negeri sedangkan para Gubernur diangkat oleh Presiden (Kumorotomo, 2008).

Pada tahun 1966 terjadi alih kekuasaan pemerintah dimana Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Soeharto, pemerintah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi masalah hubungan fiskal pusat daerah. Hal ini ditandai oleh adanya sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang secara mulus disahkan sebagai Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1968 Tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak radio Kepada Daerah, akan tetapi sebenarnya undang-undang ini tidak memuat hubungan fiskal pusat daerah secara jelas dan di dalamnya banyak pasal-pasal yang tidak konsisten (Kumorotomo, 2008).

Pada tahun 1974, pemerintahan Soeharto mensahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebagai upaya pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia, namun dalam kenyataannya tidak ada pejabat pemerintah pusat yang benar-benar tergerak untuk memberi otonomi kepada tingkat Provinsi apalagi ke tingkat Kabupaten dengan tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai hubungan fiskal antarjenjang pemerintahan sehingga kebijakan semakin mengerucut menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kumorotomo, 2008).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dianggap gagal mendukung pemerintahan daerah dan pembangunan daerah yang bersifat otonom selama beberapa dekade. Hal tersebut dibuktikan oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada daerah tingkat II yang terbit tujuh belas tahun tahun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Saragih, 2003). Kemudian pada tahun 1995 disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 1995 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengintegrasikan instansi-instansi pemerintah pusat, yaitu Kanwil dan Kandep, dengan satuan-satuan pemerintah daerah, sehingga urusan-urusan dapat diserahkan ke daerah. Namun, kontrol mengenai hal-hal menyangkut finansial tidak diberikan bersamaan dengan integrasi atau penyerahan urusan tersebut yang mengakibatkan penyerahan fungsi-fungsi justru menjadi beban bagi para pejabat di tingkat kabupaten yang menjalani uji coba otonomi daerah dan menyebabkan tidak berjalannya kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah (Kumorotomo, 2008).

Dengan tidak berjalannya undang-undang tentang desentralisasi fiskal dan otonomi daerah karena kebijakan yang lebih sentralistis dinilai menyebabkan ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah serta antardaerah sudah sangat lebar mengingat kuatnya kebijakan sentralistis di bidang pemerintahan yang hampir semuanya diatur oleh pemerintah pusat. Pada tahun 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjawab kondisi dari sistem sentralistis dan mengeluarkan suatu keputusan politik yang diformulasikan dalam bentuk TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Nyata, Luas dan Bertanggung Jawab. Ketetapan MPR ini juga mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan ini juga merupakan cikal bakal lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 Tentang Keuangan Daerah (Kumorotomo, 2008).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah sepenuhnya dilaksanakan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Ketetapan MPR RI NOMOR IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah menyatakan bahwa keseluruhan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari kedua Undang-Undang tersebut agar diterbitkan selambat-lambatnya akhir Desember tahun 2000, dan daerah yang sanggup melaksanakan otonomi secara penuh dapat segera memulai pelaksanaannya terhitung 1 Januari 2001 yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah demikian pula Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan titik tolak dimulainya otonomi daerah.

Desentralisasi fiskal adalah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan layanan publik yang lebih demokratis dengan melimpahkan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat, dan adanya bantuan dalam bentuk ransfer dari pemerintah pusat (Sidik dalam Badrudin, 2012). Saragih (2003) menuliskan desentralisasi fiskal sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan layanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1, desentralisasi fiskal adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal (Basri, 2002). Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Basri dan Munandar, 2009).

Otonomi daerah merupakan suatu proses jangka panjang yang mengisyaratkan pentingnya kesadaran seluruh masyarakat lokal dalam proses pembangunan, Saragih (2003). Otonomi daerah bukan hanya sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah saja, melainkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerahnya (Badrudin, 2012). Hubungan perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, menjadi kunci pokok keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, karena daerah memerlukan kepastian sumber-sumber keuangan guna membiayai belanja daerah (Rahayu, 2010).

Sumber-sumber keuangan pemerintah daerah meliputi pendapatan daerah dan pembiayaan daerah yang dimana pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Sedangkan pembiayaan daerah terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam upaya menggali dan meningkatkan pendapatan daerahnya sebagai bentuk dari implementasi desentralisasi fiskal.

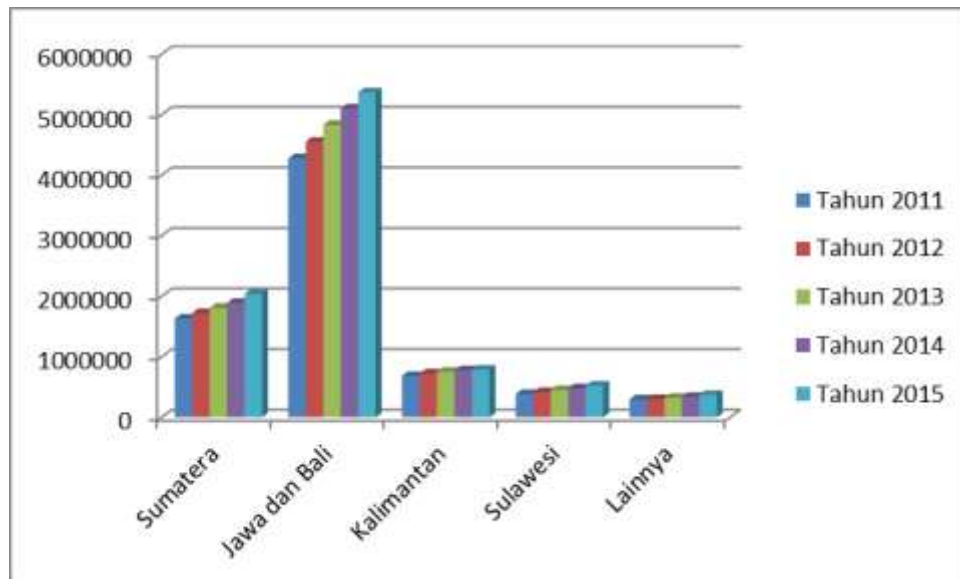
Kemudian dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya, tiap-tiap pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 8.

Namun, dalam perumusan dan pembuatan setiap peraturan daerah yang akan digunakan sebagai dasar hukum dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, tiap-tiap daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor dan impor sebagaimana tertuang dalam Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 7.

Dengan adanya otonomi dan desentralisasi fiskal dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing, karena setiap daerah dapat melakukan pembangunan ekonomi daerahnya (Sasana, 2011). Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah (Arsyad, 2010). Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama berinisiatif membangun daerahnya. Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa ragam pembangunan yang diterapkan berbeda-beda. Dalam membangun

suatu daerah, kebijakan yang diambil harus sesuai dengan kondisi (masalah, prioritas, dan potensi) daerah (Arsyad, 2010). Berikut adalah grafik dari PDRB Atas Harga Konstan 2010 berdasarkan Wilayah di Indonesia:



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2011-2015 (data diolah)

Gambar 1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 atas Kelompok Wilayah di Indonesia tahun 2011-2015 dalam Miliar Rupiah

Gambar 1. menggambarkan perbandingan perekonomian di Indonesia berdasarkan pengelompokan wilayah yang terbagi atas 5 wilayah yakni Sumatera, Jawa dan Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Lainnya (Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku dan Papua). Pembagian kelompok wilayah ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Gambar 1. juga menjabarkan bagaimana kondisi perekonomian Indonesia yang terbagi dalam 5 wilayah atas Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010. Wilayah dengan pencapaian PDRB tertinggi adalah Jawa dan Bali, yang secara konsisten menjadi pemimpin atas 4 wilayah lainnya dalam kurun waktu 2011 hingga 2015. Sedangkan wilayah Sumatera adalah wilayah

dengan pencapaian PDRB tertinggi kedua setelah Jawa dan Bali berturut-turut selama kurun waktu 2011 hingga 2015.

Perekonomian terbesar ketiga yakni wilayah Kalimantan, kemudian diikuti Sulawesi dan yang paling terakhir adalah Lainnya yang mencakup NTB, NTT, Maluku dan Papua. Dari perbandingan ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia lebih tercermin geliat ekonominya di Pulau Jawa dan Bali dan menunjukkan juga aktivitas perekonomian yang sangat tinggi. Berbeda dengan wilayah lainnya yang masih terkesan lambat dalam perekonomiannya. Perbedaan tingkat perekonomian di 5 wilayah tersebut menggambarkan juga adanya ketidakmerataan pembangunan, sebagai contoh pada tahun 2015, Pulau Jawa dan Bali mampu mewujudkan PDRB sebesar Rp 5.372.330,78 Miliar, sedangkan Pulau Sumatera hanya mencatatkan pencapaian sebesar Rp 2.038.943,01 Miliar, kemudian Pulau Kalimantan mencatatkan nilai sebesar Rp 790.946,66 Miliar, Pulau Sulawesi sebesar Rp 525.019,73 dan wilayah Lainnya (NTB, NTT, Maluku dan Irian Jaya) sebesar Rp 374.526,27 Miliar.

Sumatera sebagai wilayah dengan perekonomian terbesar kedua di Indonesia terlihat sangat jauh perbedaannya dari Jawa dan Bali, dengan nilai PDRB Jawa dan Bali dua kali lipat lebih besar dari Sumatera . Secara administratif, pemerintahan di Pulau Sumatera terbagi atas 10 Provinsi. Berikut adalah tabel daerah otonom tingkat Provinsi di Sumatera:

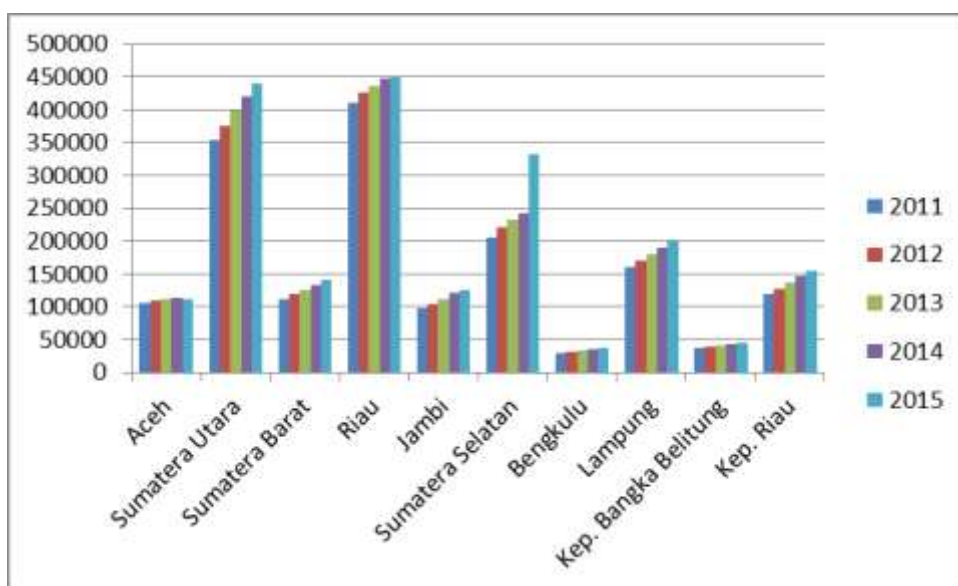
Tabel 1. Daerah Otonomi tingkat Provinsi di Pulau Sumatera

PROVINSI	Undang-Undang Pembentukan
Nangroe Aceh Darussalam	Nomor 24 Tahun 1956
Sumatera Utara	Nomor 24 Tahun 1956
Sumatera Barat	Nomor 61 Tahun 1958
Riau	Nomor 61 Tahun 1958
Jambi	Nomor 61 Tahun 1958
Sumatera Selatan	Nomor 25 Tahun 1959
Lampung	Nomor 14 Tahun 1964
Bengkulu	Nomor 9 Tahun 1967
Bangka Belitung	Nomor 27 Tahun 2000
Kepulauan Riau	Nomor 25 Tahun 2002
Sumber:	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, data diolah

Berdasarkan Tabel 1. Pulau Sumatera terbagi atas 10 daerah Provinsi dimana provinsi yang pertama terbentuk adalah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, kemudian bertambah 3 Provinsi Baru yakni Sumatera barat dan Riau sehingga menjadi 5 daerah pemerintahan pada tahun 1958. Setahun kemudian muncul kembali wilayah pemekaran baru yakni Sumatera Selatan, lalu diikuti oleh Lampung 5 tahun kemudian, dan setahun setelah lampung adalah Bengkulu yang menjadi wilayah pemekaran baru. Pemekaran wilayah pemerintah daerah Provinsi selanjutnya terjadi dalam waktu yang sangat lama yakni 36 tahun kemudian yaitu Provinsi Bangka Belitung.

Awal pelaksanaan desentralisasi fiskal di Sumatera secara otomatis hanya dilakukan oleh 9 Provinsi yang dimana pelaksanaan desentralisasi fiskal baru efektif dilaksanakan mulai 1 Januari 2001. Kemudian setahun setelah pelaksanaan desentralisasi barulah muncul Provinsi baru yakni Provinsi Kepulauan Riau yang terbentuk pada tahun 2002.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Sumatera yakni tepatnya di 10 Provinsi tidak terlepas dari tujuan desentralisasi fiskal yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, Provinsi di Sumatera semakin giat dalam memacu perekonomian daerahnya masing-masing dengan mengelola sumber daya masing-masing daerah. Berikut adalah grafik PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 di 10 Provinsi Sumatera:

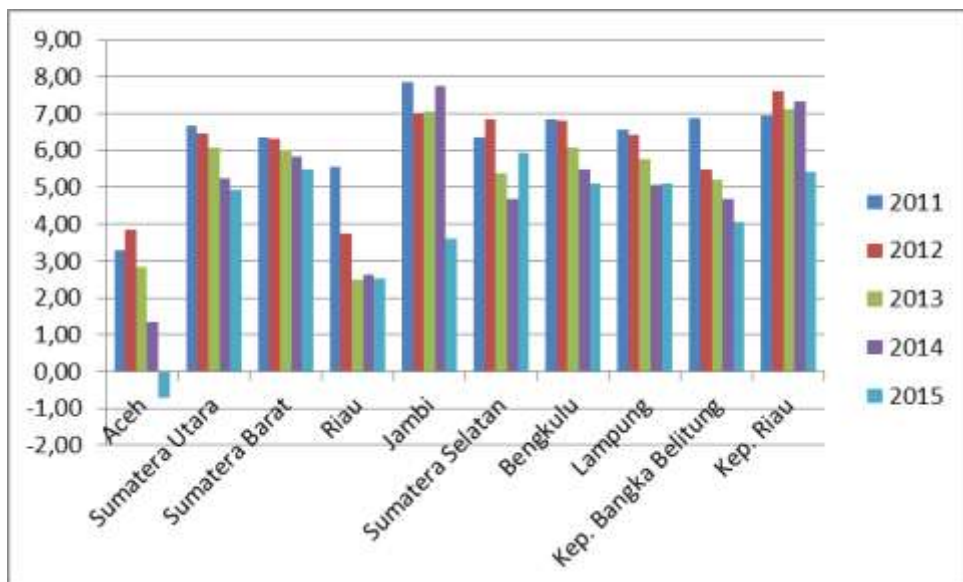


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi tahun 2011-2015 (data diolah)

Gambar 2. PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi di Pulau Sumatera 2011-2015 dalam Miliar Rupiah

Gambar 2. menunjukkan pencapaian tingkat perekonomian 10 Provinsi di Sumatera. Posisi pertama ditempati oleh Provinsi Riau yang secara konsisten menjadi pemimpin dari kurun waktu 2011 hingga 2015. Posisi kedua ditempati oleh Provinsi Sumatera Utara yang juga secara konsisten di posisi kedua dalam kurun waktu 2011 hingga 2015. Kemudian di posisi ketiga ditempati oleh Provinsi Sumatera Selatan yang juga konsisten di posisi ketiga dalam kurun waktu 2011 hingga 2015.

Sedangkan posisi keempat ditempati oleh Provinsi Lampung dari tahun 2011 hingga 2015, di ikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau di posisi kelima, Provinsi Sumatera Barat di Posisi keenam. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di posisi kesembilan dan Provinsi Bengkulu di posisi kesepuluh. Sedangkan Provinsi Aceh diposisi ketujuh pada tahun 2011 hingga 2012, Provinsi Jambi diposisi kedelapan pada tahun 2011 hingga 2012. Namun pada tahun 2013 hingga 2015 posisi ketujuh ditempati Provinsi Jambi yang berhasil menggeser Provinsi Aceh turun menjadi posisi kedelapan di tahun 2013 hingga 2015. Selain melihat dari jumlah PDRB yang menggambarkan kondisi perekonomian secara nominal, kondisi perekonomian dapat juga dilihat dari bagaimana besaran pertumbuhan ekonominya. Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi Provinsi di Sumatera tahun 2011 sampai tahun 2015:



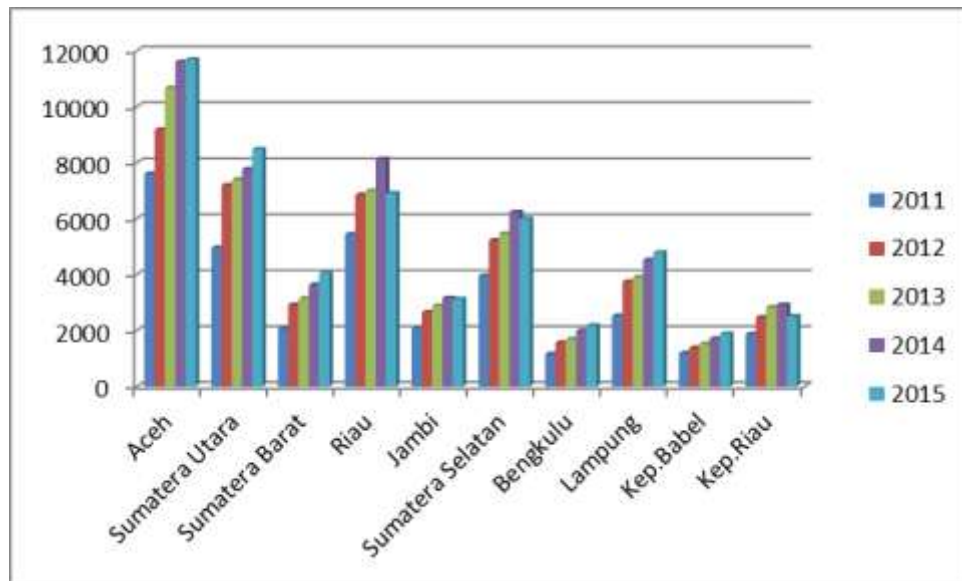
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi tahun 2011-2015 (data diolah)

Gambar 3. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera 2011-2015 (%)

Gambar 3. menjelaskan bagaimana kondisi perekonomian Provinsi di Pulau Sumatera dilihat dari sisi pertumbuhan ekonominya secara persentase. Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2011 adalah Provinsi Jambi, kemudian diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau di posisi kedua, Provinsi Bangka Belitung di Posisi ketiga, Provinsi Sumatera Utara di posisi keempat, Provinsi Bengkulu di posisi kelima, Provinsi Lampung keenam, Provinsi Sumatera Selatan posisi ketujuh, Provinsi Sumatera Barat posisi kedelapan, Provinsi Riau posisi kesembilan, dan Provinsi Aceh kesepuluh. Pada tahun 2012 dan 2013 posisi pertama ditempati oleh Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Provinsi Jambi di posisi kedua ditahun yang sama. Sedangkan posisi ketiga ditahun 2012 ditempati oleh Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu keempat, Provinsi Sumatera Utara kelima, Provinsi Lampung keenam, Provinsi Sumatera Barat ketujuh, Provinsi Bangka Belitung kedelapan, Provinsi Aceh kesembilan dan Provinsi Riau kesepuluh.

Pada tahun 2015 Provinsi dengan pertumbuhan tertinggi adalah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi dengan pertumbuhan terendah adalah Provinsi Aceh. Dari Gambar 2. dan Gambar 3. dapat dilihat bagaimana kondisi perekonomian Provinsi di Pulau Sumatera yang berbeda-beda disetiap tahunnya yang mengindikasikan terjadinya kompetisi ekonomi. Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi daerah atau ekonomi regional tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan pembangunan nasional, salah satu sasaran pembangunan nasional Indonesia adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan, termasuk di dalamnya pemerataan

pendapatan antar daerah (wilayah) (Yulianita, 2009). Berikut adalah grafik pendapatan daerah di 10 Provinsi Sumatera:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi tahun 2011-2015 (data diolah)

Gambar 4. Realisasi Total Pendapatan Daerah Provinsi di Sumatera 2011-2015 dalam Miliar Rupiah

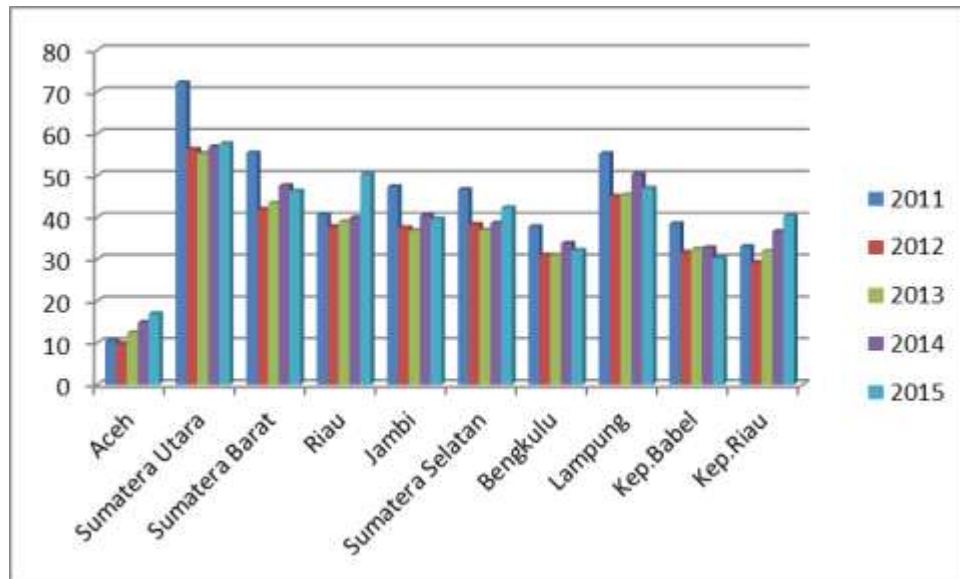
Berdasarkan Gambar 4. menunjukkan perbandingan dari realisasi total pendapatan daerah di Pulau Sumatera. Dari ke sepuluh Provinsi di Sumatera, pendapatan daerah tertinggi dimiliki oleh Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2011 hingga 2015. Provinsi Sumatera Utara menempati posisi ketiga pada tahun 2011, namun menjadi posisi kedua pada tahun 2012 hingga 2015. Provinsi Riau menempati posisi kedua pada tahun 2011, namun menjadi posisi ketiga pada tahun 2012 hingga 2014, sedangkan pada tahun 2015 menempati posisi keempat. Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2011 hingga 2014 menempati posisi keempat, namun pada tahun 2015 menempati posisi ketiga. Sedangkan Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Barat secara konsisten masing-masing menempati posisi kelima dan keenam dari tahun 2011 hingga 2015.

Gambar 4. ini juga menggambarkan bagaimana setiap Pemerintahan Provinsi berupaya untuk terus meningkatkan pendapatan daerahnya masing-masing, namun dilain pihak dengan pendapatan sebesar ini, ternyata dalam hal kemandirian daerah belum tentu sejalan dengan pendapatan total yang besar. Berikut adalah tabel pendapatan asli daerah dan grafik kemandirian daerah Provinsi di Pulau Sumatera:

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Pulau Sumatera 2011-2015 (Miliar Rupiah)

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
Aceh	802,84	901,72	1325,43	1731,13	1985,83
Sumatera Utara	3578,46	4052,1	4091,28	4416,81	4883,88
Sumatera Barat	1147,3	1225,46	1366,17	1729,22	1876,73
Riau	2210,13	2588,68	2725,62	3245,08	3476,96
Jambi	984,23	995,82	1063,92	1281,23	1241,23
Sumatera Selatan	1849,12	2001,73	2021,69	2407,9	2534,52
Bengkulu	440,92	483,76	525,21	672,06	701,3
Lampung	1395,67	1687,7	1771,29	2274,68	2247,34
Kep.Babel	459,21	438,37	495,79	562,92	571,8
Kep.Riau	620,9	723,05	907,98	1070,21	1012,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi tahun 2011-2015 (data diolah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi tahun 2011-2015 (data diolah)

Gambar 5. Kemandirian Daerah Provinsi di Pulau Sumatera 2011-2015 (%)

Gambar 5. menjelaskan mengenai posisi dari kemandirian tiap tiap Provinsi di Pulau Sumatera. Provinsi dengan nilai kemandirian daerah terkecil adalah Provinsi Aceh dan Provinsi dengan kemandirian daerah terbesar adalah Provinsi Sumatera Utara. Besar dan kecilnya kemandirian daerah tiap Provinsi di Pulau Sumatera ditentukan oleh seberapa besar masing-masing Provinsi memungut pendapatan asli daerahnya seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Menjelaskan besaran dari pendapatan asli daerah masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera. Provinsi dengan pendapatan asli daerah terbesar adalah Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 2011 hingga 2015. Sedangkan Provinsi yang memiliki pendapatan asli daerah terendah adalah Provinsi Bengkulu pada tahun 2011 dengan nilai sebesar Rp 440,92 Miliar, tetapi pada tahun 2012 hingga tahun 2015, Provinsi dengan nilai pendapatan

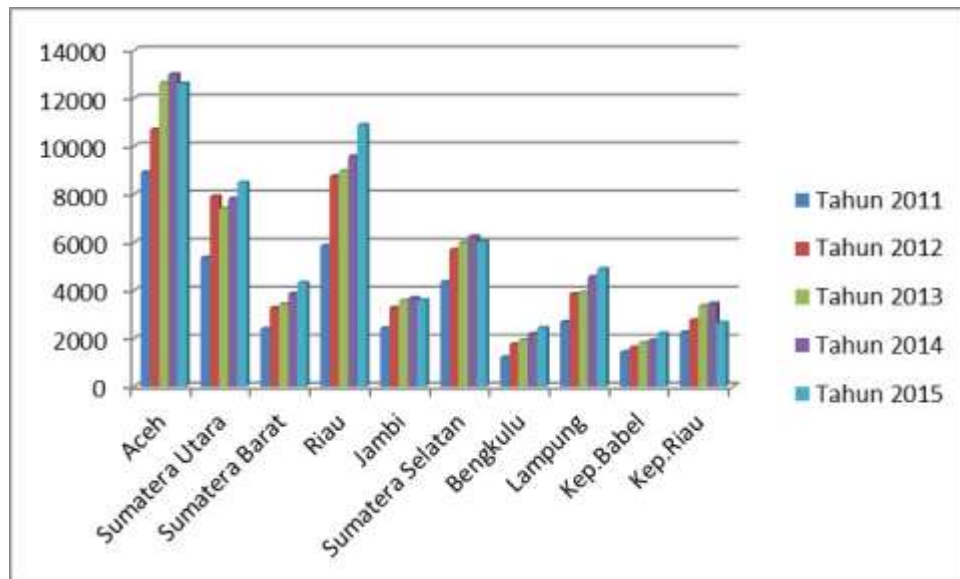
asli daerah terkecil adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun Kepulauan Bangka Belitung memiliki pendapatan asli daerah terkecil, namun tidak menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Provinsi dengan kemandirian daerah terkecil, melainkan Provinsi Aceh yang menjadi Provinsi dengan kemandirian daerah terkecil mengingat rasio pendapatan asli daerahnya terhadap total pendapatan daerahnya hanya berkisar 9% hingga 16%.

Provinsi yang mencapai kemandirian diatas 50% secara konsisten hanya Provinsi Sumatera Utara, sedangkan beberapa Provinsi lainnya hanya pada tahun-tahun tertentu mampu mencapai 50%. Provinsi Sumatera Barat yang kemandiriannya mampu mencapai 55% pada tahun 2011 dan setelah itu selalu dibawah 50%. Provinsi Riau mampu mencapai kemandirian sebesar 50,31% yang terjadi pada tahun 2015, dan Provinsi Lampung yang mampu mencapai kemandirian diatas 50% terjadi pada tahun 2011 dengan nilai sebesar 55,20% dan pada tahun 2014 dengan nilai 50,25%. Kondisi ini merupakan cerminan bahwa masih sedikit Provinsi yang mampu memaksimalkan pendapatan asli daerahnya sebagai sumber pendanaan pemerintahan daerahnya masing-masing dan masih besarnya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah membuat pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan. Peran alokasi dari pemerintah daerah

tersebut tercermin dalam pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk belanja daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berikut adalah grafik pengeluaran pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera;



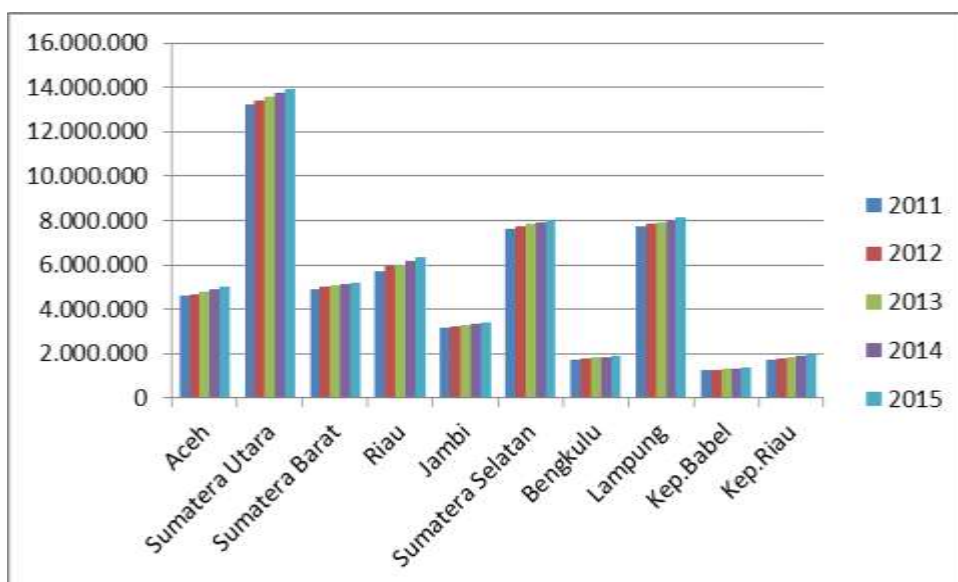
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi tahun 2011-2015 (data diolah)

Gambar 6. Total Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera 2011-2015 (%)

Gambar 6. menjelaskan besaran dari pengeluaran pemerintah daerah Provinsi di Pulau Sumatera dalam kurun waktu 2011 hingga 2015. Provinsi dengan pengeluaran pemerintah terbesar adalah Provinsi Aceh secara konsisten dari tahun 2011 hingga tahun 2015, meskipun pada tahun 2015 pengeluaran pemerintah Provinsi Aceh sedikit mengalami penurunan, namun nilai pengeluaran pemerintahnya tetaplah besar dengan nilai sebesar Rp 12.611,11 Miliar pada tahun 2015. Provinsi dengan jumlah pengeluaran pemerintah terbesar kedua adalah Provinsi Riau, terbesar ketiga adalah Provinsi Sumatera Utara, keempat adalah Provinsi Sumatera Selatan dan kelima adalah Provinsi Lampung.

Sedangkan Provinsi dengan pengeluaran pemerintah terkecil adalah Provinsi Bengkulu pada tahun 2011, namun pada tahun 2012 hingga tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Provinsi yang memiliki pengeluaran pemerintah yang terkecil di Pulau Sumatera.

Terlepas dari besar kecilnya sumber pendapatan daerah dan pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera, hal lain yang menjadi bagian dari pembangunan adalah jumlah penduduk. Berikut grafik besaran jumlah penduduk di Sumatera:

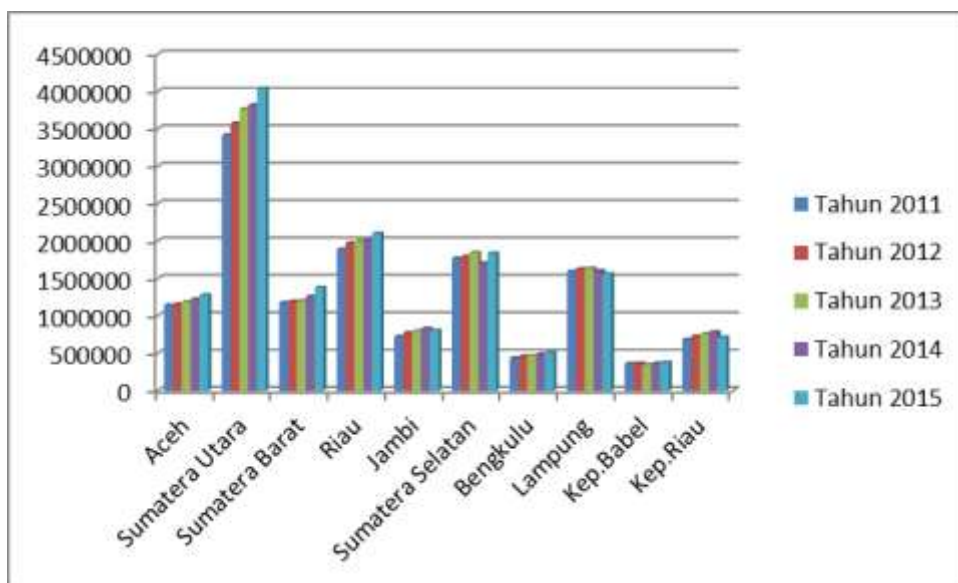


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi tahun 2011-2015 (data diolah)

Gambar 7. Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Tahun 2011-2015 dalam Jiwa

Gambar 7. menggambarkan perbandingan jumlah penduduk di Provinsi di Pulau Sumatera. Penduduk terpadat selama tahun 2011 sampai tahun 2015 adalah Provinsi Sumatera Utara, kemudian diikuti oleh Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk terpadat kedua di Sumatera, serta Provinsi Sumatera Selatan di posisi ketiga. Sedangkan daerah dengan jumlah penduduk terkecil

adalah Provinsi Bangka Belitung diikuti Provinsi Bengkulu sebagai daerah dengan jumlah penduduk terkecil kedua, serta Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah dengan jumlah penduduk terkecil ketiga di Sumatera. Gambar 7. juga mengindikasikan bahwa terdapat sumber daya manusia yang besar yang dimiliki oleh Pulau Sumatera yang artinya tersedianya modal manusia yang cukup potensial dalam proses pembangunan ekonomi. Berikut adalah grafik tenaga kerja pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2011-2015:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi tahun 2011-2015 (data diolah)

Gambar 8. Jumlah Tenaga Kerja Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2015 (Jiwa)

Gambar 8. menjelaskan mengenai jumlah dari tenaga kerja yang ada pada Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2011 hingga tahun 2015. Provinsi yang memiliki jumlah tenaga kerja terbesar adalah Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah antara 3.414.544 Jiwa hingga 4.042.331 Jiwa. Kemudian posisi kedua ditempati oleh Provinsi Riau dengan jumlah tenaga kerja pada tahun 2011 sebesar 1.891.216 dan 2.104.971 Jiwa pada tahun 2015. Posisi ketiga

ditempati oleh Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah tenaga kerja pada tahun 2011 sebesar 1.770.832 Jiwa dan sebesar 1.838.836 Jiwa. Kemudian Provinsi yang memiliki tenaga kerja terkecil adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan data-data yang telah ditampilkan dan dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai desentralisasi fiskal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu penulis tertarik mengangkat permasalahan ini untuk menjadi suatu karya ilmiah yang berjudul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera”**.

B. Rumusan Masalah

Mengamati perkembangan desentralisasi fiskal di Pulau Sumatera yang telah terjadi dengan terbentuknya daerah-daerah pemekaran yang semula berjumlah 9 Provinsi sebelum desentralisasi dan bertambah 1 Provinsi menjadi 10 Provinsi setelah desentralisasi. Serta merujuk dari penelitian sebelumnya yang dimana desentralisasi fiskal bisa berpengaruh positif atau bisa juga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka pertanyaan ilmiah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Desentralisasi Fiskal sisi Pengeluaran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera?
2. Apakah Desentralisasi Fiskal sisi Pendapatan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera?
3. Apakah Tenaga Kerja Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera?
4. Apakah secara bersama sama variabel independen (Desentralisasi Fiskal Pengeluaran, Desentralisasi Fiskal Pendapatan dan Tenaga Kerja) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dimunculkan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal sisi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera.
2. Untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal sisi pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera.
3. Untuk menganalisis pengaruh Tenaga Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera.
4. Untuk menganalisis pengaruh variabel independen independen (Desentralisasi Fiskal sisi Pendapatan, Desentralisasi Fiskal sisi Pengeluaran, dan Tenaga Kerja) secara bersama sama terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut

1. Hasil penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan terhadap penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara (Arsyad, 2010).

Beberapa teori pertumbuhan ekonomi dari pakar ekonomi dunia dalam Arsyad (2010):

1. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori ini dikembangkan hampir pada waktu yang bersamaan oleh Roy F. Harrod (1984) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod-Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis), sedangkan Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis).

Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (steady growth) dalam jangka panjang. Asumsi yang dimaksud di sini adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proposional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dengan produksi (Capital Output Ratio/COR) tetap perekonomian terdiri dari dua sektor

$$(Y = C + I).$$

Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut :

$$g = K = n$$

Dimana :

g = Growth (tingkat pertumbuhan output)

K = Capital (tingkat pertumbuhan modal)

n = Tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Harrod-Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan permintaan barang.

2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori pertumbuhan neo-klasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dan T.W. Swan (1956). Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi.

Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah dimasukkannya unsur kemajuan teknologi dalam modelnya. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Dengan demikian, syarat-syarat adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dalam model Solow-Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi antara tenaga kerja dan modal. Hal ini berarti ada fleksibilitas dalam rasio modal-output dan rasio modal-tenaga kerja. Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri atau mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber yaitu, akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik, sehingga produktivitas capital meningkat. Dalam model tersebut, masalah teknologi dianggap sebagai fungsi dari waktu.

Teori neo-klasik sebagai penerus dari teori klasik menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar sempurna, perekonomian bisa tumbuh maksimal. Sama seperti dalam ekonomi model klasik, kebijakan yang perlu ditempuh adalah meniadakan hambatan dalam perdagangan, termasuk perpindahan orang, barang, dan modal. Harus dijamin kelancaran arus barang, modal, dan tenaga kerja, dan perlunya penyebaran informasi pasar. Harus diusahakan terciptanya prasarana perhubungan yang baik dan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan stabilitas politik. Analisis lanjutan dari paham neoklasik menunjukkan bahwa untuk terciptanya suatu pertumbuhan yang mantap (*steady growth*), diperlukan suatu tingkat saving yang tinggi dan seluruh keuntungan pengusaha diinvestasikan kembali.

B. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Mulyadi, 2003). Tenaga kerja terbagi menjadi dua kelompok (Mulyadi, 2003) yakni:

1. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang berusia 15-64 tahun yang bekerja dan memiliki pekerjaan, sedang menganggur atau mencari kerja.

2. Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang berusia 15-64 tahun yang tidak melakukan kegiatan bekerja sama sekali hanya melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Lewis dalam Mulyadi (2003) mengemukakan teorinya mengenai ketenagakerjaan, yaitu; kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan *output* dan penyediaan pekerja disektor lain.

Selanjutnya Lewis mengemukakan bahwa ada dua sektor di dalam perekonomian negara sedang berkembang, yaitu sektor modern dan sektor tradisional. Sektor tradisional tidak hanya berupa sektor pertanian di pedesaan, melainkan juga termasuk sektor informal di perkotaan (pedagang kaki lima, pengecer, pedagang angkringan).

Sedangkan dari sisi kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti dalam penelitian Lin (1996) menyimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara Jepang dan Korea Selatan dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang berkualitas yang tercermin dalam tingkat melek huruf (*literacy rate*) yang tinggi sehingga tenaga kerja mudah menyerap ilmu dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan ekonomi yang terjadi . Kemudian Akai dan Sakata (2002) yang dimana hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa kuantitas dan kualitas dari sumber daya manusia regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika

C. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan mengelola penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Rahayu, 2010).

Tujuan dari kebijakan fiskal menurut John F. Due dalam Rahayu (2010), yaitu:

1. Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi.
2. Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
3. Untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi.

Sedangkan jenis-jenis kebijakan fiskal dalam Rahayu (2010) yaitu:

1. Kebijakan fiskal ekspansif (*expansionary fiscal policy*), yaitu kebijakan yang menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi dan pengangguran yang tinggi.
2. Kebijakan fiskal kontraktif, yaitu suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.

D. Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sidik dalam Badrudin (2012), desentralisasi fiskal adalah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan layanan publik yang lebih demokratis dengan melimpahkan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk ransfer dari pemerintah pusat.

Sedangkan menurut Bird dan Vaillancourt dalam Badrudin (2012), desentralisasi mempunyai tiga pengertian yaitu pertama, dekonsentrasi, artinya pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah. Kedua, delegasi artinya daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah. Ketiga, devolusi, artinya berhubungan dengan situasi tertentu yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan di daerah.

Secara garis besar, pengertian desentralisasi dibedakan dalam tiga jenis menurut Litvack dalam Abimanyu dan Megantara (2009) yakni:

1. Desentralisasi Politik, pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang menyangkut aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai aturan.
2. Desentralisasi Administratif, merupakan pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan.
3. Desentralisasi Fiskal, merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi.

Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal, yang meliputi aspek penerimaan dan pengeluaran (Badan Analisa Fiskal, 2002).

E. Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal (Basri, 2002). Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Basri dan Munandar, 2009).

Otonomi daerah merupakan suatu proses jangka panjang yang mengisyaratkan pentingnya kesadaran seluruh masyarakat lokal dalam proses pembangunan, Saragih (2003). Otonomi daerah bukan hanya sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah saja, melainkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerahnya (Badrudin, 2012). Hubungan perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, menjadi kunci pokok keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, karena daerah memerlukan kepastian sumber-sumber keuangan guna membiayai belanja daerah (Rahayu, 2010).

F. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Rahayu (2010) Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan penjabaran rencana kerja para penyelenggara daerah yang dituangkan dalam suatu format yang memuat pengelompokan jenis transaksi berkaitan dengan rencana kegiatan penyelenggaraan daerah menurut pengaruhnya terhadap posisi keuangan daerah dalam kurun waktu setahun (Noor, 2013).

Sedangkan menurut Rahayu (2010) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang setiap tahunnya ditetapkan dengan undang-undang, dan didalamnya terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1, yang dimaksud Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 4, Fungsi APBD adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Otorisasi

Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan, dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

b. Fungsi Perencanaan

Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah dapat menjadi pedoman bagi daerah untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka daerah dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan berarti anggaran daerah harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Fungsi Alokasi

Fungsi Alokasi yaitu yang mengadakan alokasi terhadap sumber-sumber dana untuk mengadakan barang-barang kebutuhan perseorangan dan sarana yang dibutuhkan untuk kepentingan umum.

e. Fungsi Distribusi

Fungsi Distribusi yaitu kebijakan-kebijakan di dalam penganggaran daerah harus memperhatikan keadilan dan kepatutan. Berarti bahwa anggaran daerah harus didistribusikan ke setiap pos-pos pengeluaran yang penting dan menyangkut pelayanan terhadap masyarakat.

f. Fungsi Stabilisasi

Fungsi Stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

3. Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ada beberapa alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan tersebut menurut Noor (2013), yaitu :

a. Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Defisit

Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) defisit adalah kebijakan di mana uang yang diterima daerah dari masyarakat (yang berasal dari pajak dan retribusi) lebih sedikit daripada uang yang

dibelanjakan pemerintah. Artinya dalam kondisi ini pemerintah mengalami kekurangan uang (defisit).

b. Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surplus

Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Daerah (APBD) surplus adalah kebijakan di mana uang yang diterima daerah dari masyarakat (yang berasal dari pajak dan retribusi) lebih banyak daripada uang yang dibelanjakan pemerintah. Artinya dalam kondisi ini pemerintah mengalami kelebihan uang (surplus).

c. Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berimbang

Kebijakan di mana uang yang diterima daerah dari masyarakat (yang berasal dari pajak dan retribusi) sama jumlahnya dengan uang yang dibelanjakan pemerintah. Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berimbang ini dipilih pemerintah biasanya pada kondisi ekonomi relatif stabil. Dengan demikian untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional yang kondusif, di mana angka pengangguran dan inflasi relatif rendah, maka pemerintah menggunakan Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berimbang.

G. Teori Pengeluaran Pemerintah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam keuangan negara atau keuangan daerah mencakup atas aspek penerimaan dan aspek pengeluaran. Pemerintah tidak hanya memperoleh penerimaan tetapi juga melakukan pengeluaran. Aspek Penerimaan dan aspek pengeluaran pemerintah dimasukkan dalam suatu konsep mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tingkat pusat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tingkat daerah.

Menurut Mangkoesoebroto (1998) Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro (Mangkoesoebroto, 1998).

1. Teori Makro

Teori makro mengenai perkembangan pemerintah yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi dapat digolongkan ke dalam tiga golongan (Mangkoesoebroto, 1998), yaitu :

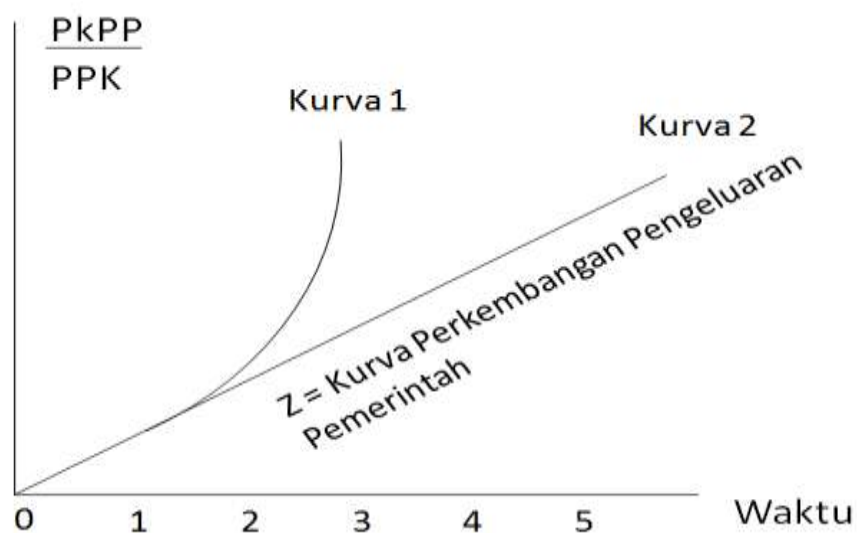
a. Model Rostow dan Musgrave

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi peranan investasi swasta juga semakin besar.

Musgrave dan Rostow mengatakan bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow dalam mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

b. Model Wagner

Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Wagner menyebutnya dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teori Wagner adalah semakin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner juga berpendapat bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.



Sumber: Mangkoesoebroto (1998)

Gambar 9. Kurva Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner

Kelemahan pada hukum Wagner adalah karena hukum ini tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut

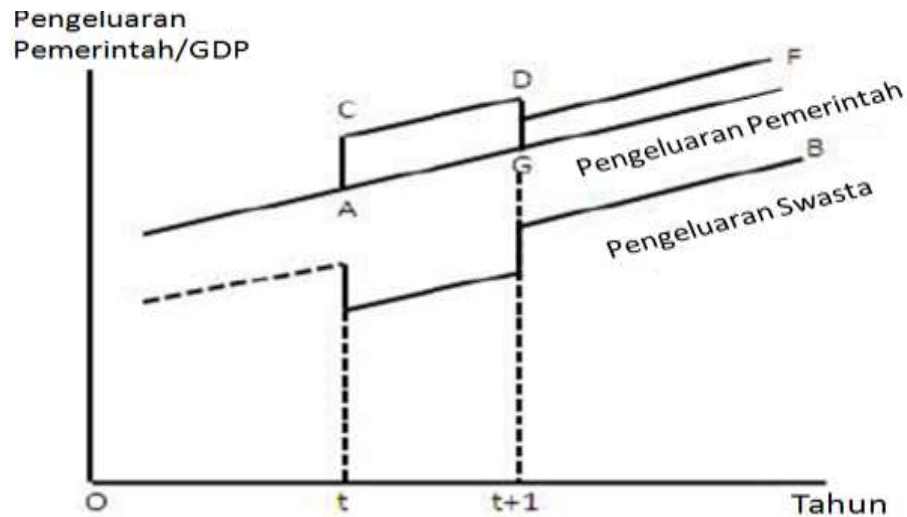
organic theory of state yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain.

c. Model Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman berpendapat bahwa bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, teori ini merupakan dasar pada teori pemungutan suara.

Peacock dan Wiseman mendasarkan pada suatu teori bahwa suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak pada yang dibutuhkan oleh pemerintah bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak.

Peacock dan Wiseman berpendapat bahwa pengeluaran dari waktu ke waktu semakin meningkat karena semakin bertambahnya kegiatan pemerintah yang memerlukan pembiayaan. Peacock dan Wiseman juga berpendapat perkembangan pengeluaran negara tidak bersifat pertumbuhan yang berkelanjutan tetapi berpola seperti tangga rumah.



Sumber: Mangkoesobroto (1998)

Gambar 10. Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah menurut Peacock dan Wiseman

2. Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik (Mangkoesobroto, 1993). Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan dengan beberapa faktor di bawah ini (Mangkoesobroto, 1998):

- a. Perubahan permintaan akan barang publik
- b. Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.

- c. Perubahan kualitas barang publik
- d. Perubahan harga-harga faktor-faktor produksi.

H. Sumber Penerimaan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bratakusumah dan Solihin, 2001).

Basri dan Munandar (2009) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dihasilkan dari upaya daerah sendiri yang berasal dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi, bagi hasil keuntungan perusahaan daerah, dan berbagai hasil usaha lainnya yang sah menurut peraturan.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat, baik yang berasal dari bagi hasil PBB, Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan, Penerimaan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Basri dan Munandar, 2009).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ini mencoba mengatur suatu perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah yang berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab antar tingkat pemerintahan (BPEKKI DEPKEU, 2006).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan definisi dari dana perimbangan, dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Undang-Undang ini juga menjelaskan desentralisasi fiskal di Indonesia diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan, yang terdiri atas transfer Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat kepada daerah otonom.

Secara keseluruhan, kontribusi pos-pos dana perimbangan terhadap APBD pemerintah daerah (BPEKKI DEPKEU, 2006), yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi hasil pajak porsi terbesar adalah pemerintah kota dengan kontribusi sebesar 11,7%, diikuti oleh pemerintah provinsi sebesar 7,9% dan terendah adalah pemerintah kabupaten sebesar 7,2%.

- b. Bagi hasil bukan pajak/SDA porsi terbesar adalah pemerintah provinsi dengan kontribusi sebesar 9,7%, diikuti oleh pemerintah kota sebesar 5,5% dan terendah adalah pemerintah kabupaten sebesar 4,5%.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) porsi terbesar adalah pemerintah kabupaten dengan kontribusi sebesar 72,3%, diikuti oleh pemerintah kota sebesar 59,5%, dan terendah adalah pemerintah provinsi sebesar 24,9%.
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) porsi terbesar adalah pemerintah provinsi dengan kontribusi sebesar 5,6%, diikuti oleh pemerintah kabupaten sebesar 2,9%, dan terendah adalah pemerintah kota sebesar 2,3%.

3. Pinjaman Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjelaskan bahwa Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Undang-Undang ini juga menjelaskan sumber pinjaman daerah, berasal dari : Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Lembaga keuangan bank, Lembaga keuangan bukan bank, dan Masyarakat.

Pinjaman daerah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan masyarakat berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui pasar modal. Tujuan dari pinjaman daerah adalah memperoleh sumber pembiayaan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pembiayaan yang bersumber atas pinjaman daerah harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan

daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional (Badrudin, 2012).

4. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, (BPEKKI DEPKEU, 2006). Lain-lain pendapatan yang sah bersumber dari pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

I. Belanja Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ditegaskan bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah ditentukan bahwa struktur belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan.

Belanja tidak langsung berupa belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan

belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja dapat dikategorikan menurut karakteristiknya menjadi dua bagian, yaitu:

1. Belanja selain modal (Belanja administrasi umum; Belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik; Belanja transfer; Belanja tak terduga).
2. Belanja modal.

Secara umum belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu:

1. Belanja Administrasi Umum.

Merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu:

- a. Belanja pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk orang/personal yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.

- b. Belanja barang merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
- c. Belanja perjalanan dinas merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.
- d. Belanja pemeliharaan merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

2. Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana publik

Merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi:

- a. Belanja pegawai (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk orang/personal yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.
- b. Belanja barang (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
- c. Belanja perjalanan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah

Daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

- d. Belanja pemeliharaan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.

3. Belanja Modal

Merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi:

- a. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
- b. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur.

4. Belanja Transfer

Merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran:

- a. Angsuran pinjaman.
- b. Dana bantuan.

- c. Dana cadangan.
- d. Belanja tak tersangka adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa.

5. Belanja tak Tersangka

Merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa.

Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Badrudin (2012), belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian layanan umum. Sedangkan menurut Sasana (2011), Belanja merupakan variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

J. Kajian Penelitian Sebelumnya

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel yang digunakan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Akai dan Sakata (2002)	Fiscal Decentralization contributes to Economic Growth : Evidence from state-level cross section data for the united state.	Rata-rata tingkat pertumbuhan Gross State Product (GSP) per kapita, level awal pertumbuhan GSP, Rasio lulusan SMA terhadap penduduk usia 18-24, pertumbuhan penduduk, porsi kursi demokrat dilegislatif, koefisien gini, paten, keterbukaan, indikator pengeluaran desentralisasi fiskal, indikator pendapatan desentralisasi fiskal, indikator otonomi kemandirian daerah dan derajat desentralisasi.	Model Regresi data panel dengan metode <i>fixed effect</i> di 50 negara bagian USA.	Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dimana indikator pengeluaran dan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan indikator otonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan.
Zhang dan Zou (1998)	Fiscal Decentralization, public spending, and economic growth in China.	Pertumbuhan GDP riil Provinsi, Tingkat Pertumbuhan Angkatan kerja, Rasio Investasi terhadap GDP, Keterbukaan ekonomi, Inflasi, Tax Rates, Indikator pengeluaran.	Model Regresi data panel dengan metode OLS.	Desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Peneliti	Judul	Variabel yang digunakan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Davoodi dan Zou (1998)	Fiscal decentralization and Economic growth : A cross-country study	Tingkat pertumbuhan GDP riil perkapita, Tingkat pertumbuhan penduduk, Initial Human Capital di proxy dengan enrollment school tingkat SMP, Initial GDP perkapita, Rasio investasi terhadap GDP, dan rasio pengeluaran.	Model Regresi data panel dengan metode OLS.	Desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, sedangkan dinegara maju tidak ditemukan pengaruh.
Woller dan Philips (1998)	Fiscal Decentralization and LDC Economic Growth: An Emperical Investigation.	Tingkat pertumbuhan GDP riil perkapita, initial level of GDP, Rasio investasi terhadap GDP, Human capitol di proxy dengan enrollment school tingkat SMP, tingkat pertumbuhan penduduk.	Model regresi data panel dengan metode fixed effect.	Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, hampir semua indikator desentralisasi fiskal menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan.

Peneliti	Judul	Variabel yang digunakan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Lin dan Liu (2000)	Fiscal Decentralization and Economic Growth in China.	Pertumbuhan GDP perkapita, rasio investasi terhadap GDP, rasio pengeluaran, rasio pendapatan, household responsibility system, kapasitas fiskal, rural population, total population,	Model regresi data panel dengan metode random effect	Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Faridi (2011)	Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth : Evidence from Pakistan	Pertumbuhan GDP, rasio penerimaan dan rasio pengeluaran, keterbukaan, inflasi, angka melek huruf, total investasi tetap	Model regresi autoregressive	Desentralisasi fiskal penerimaan dan pengeluaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
Patonov (2013)	Decentralization on Public Spending and Economic Growth : An Empirical Study on The European Union	Rasio Pendapatan terhadap GDP, investasi, inflasi, pertumbuhan penduduk, EURO area, pengeluaran pemerintah terhadap total pengeluaran pemerintah pusat	Model regresi data panel	Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 27 negara eropa.

Sumber: Daftar Pustaka, Kompilasi beberapa jurnal.

K. Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Desentralisasi Fiskal sisi Pengeluaran terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berhubungan dengan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi, Lobao dan Kraybill dalam Yamoah (2007) berpendapat bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam tiga pandangan, yaitu: *Pro-Decentralization*, *Anti-Decentralization*, dan *Intermediate Decentralization*.

Pro-decentralization didasarkan pada keterbatasan pemerintah pusat dalam menjangkau tiap-tiap daerah sehingga menciptakan ketidakefisienan dalam pelayanan. Menurut Tanzi (1996) manfaat dari adanya desentralisasi adalah karena alokasi yang efisien, yang dimana dengan adanya desentralisasi fiskal maka akan menciptakan suatu kondisi dimana pemerintah daerah akan cenderung lebih mampu menyediakan jasa dan pelayanan publik terhadap kebutuhan masyarakat di daerah daripada pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah akan benar-benar mampu melayani masyarakat lebih efisien karena faktor kedekatan dan informasi lokal yang dimiliki pemerintah daerah lebih baik ketimbang pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui efisiensi dalam alokasi sumber daya publik. Menurut Oates (1993) desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi yaitu pemerintah lokal mempunyai posisi yang lebih baik daripada pemerintah pusat untuk menyalurkan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah,

yang selanjutnya efisiensi akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi ditingkat nasional.

Pendapat lain yang mendukung desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yakni Tiebout (1956), Oates (1972), Tresch (1981, Weingast (1995)), Breton (1996) dalam Litvack et al. (1998) dalam Sidik (2002) yang menyatakan bahwa pelayanan publik yang lebih efisien seyogyanya harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memiliki kontrol yang lebih dekat karena:

- a. Pemerintah daerah lebih mampu mengetahui kebutuhan masyarakatnya.
- b. Keputusan pemerintah daerah akan lebih cepat dilakukan tanpa menunggu keputusan pemerintah pusat dalam menyediakan layanan publik terhadap masyarakat sehingga akan mendorong pemerintah daerah melakukan efisiensi dalam penggunaan dana dari masyarakat.
- c. Kompetisi antar pemerintah daerah akan menciptakan inovasi dan kreatifitas dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat.

Thiessen (2003) mengidentifikasi mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- a. Penyediaan barang dan jasa publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada setiap daerah secara seragam maka akan menimbulkan inefisiensi karena terdapat perbedaan kebutuhan setiap daerah. Dengan desentralisasi fiskal, maka setiap sumber

daya yang dimiliki harus dialokasikan secara tepat sesuai kebutuhan masing-masing daerah sehingga akan memicu efisiensi dan meningkatkan *output* perekonomian sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian dari sisi kebijakan pengeluaran, pemerintah daerah yang merespon perbedaan-perbedaan kebutuhan masyarakatnya akan cenderung lebih efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi ketimbang pemerintah pusat yang tidak merespon cepat perbedaan-perbedaan kebutuhan setiap daerah tersebut.

- b. Desentralisasi fiskal akan menciptakan kompetisi vertikal dan horizontal diantara tingkat pemerintahan yang berbeda. Dimana dalam hal ini pemerintah daerah akan lebih fokus pada persaingan dalam memberikan bermacam-macam fasilitas atau kemudahan bagi kegiatan bisnis, serta melakukan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa publik, namun tetap mempertahankan tingkat pendapatan tertentu. Hal ini akan menciptakan situasi dimana setiap pemerintah daerah akan menggunakan anggaran secara efisien untuk membiayai pengeluaran sektor publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mencegah terjadinya *over supply* barang dan jasa publik serta inefisiensi pelayanan sektor publik. Kemudian berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- c. Desentralisasi fiskal secara eksplisit menunjukkan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke

pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada pemerintah daerah untuk secara aktif mencari inovasi dalam penyediaan barang dan jasa publik. Kompetisi antar pemerintah daerah akan memacu pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik dengan biaya yang minimum namun dengan kualitas yang baik, dan mendorong efisiensi produksi sehingga akan mendorong peningkatan perekonomian.

- d. Adanya argumen politik bahwa desentralisasi fiskal akan mengurangi konsentrasi kekuatan politik, melemahkan pengaruh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam kebijakan publik dan mendorong demokrasi daerah.

Indikator desentralisasi fiskal yang sering digunakan menurut Zang dan Zou (1998) untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi yakni meningkatnya belanja pemerintah daerah dibanding belanja pemerintah pusat, dimana tingkat desentralisasi yang kian meningkat ditunjukkan oleh semakin meningkatnya rasio belanja pemerintah daerah terhadap belanja pemerintah pusat.

2. Pengaruh Desentralisasi Fiskal sisi Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Desentralisasi fiskal memiliki arti pelimpahan wewenang dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengurus penerimaan dan belanja. Desentralisasi fiskal dipercaya menjadikan pemerintahan menjadi lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya dengan mengusahakan mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti contoh

India dan China dalam Laporan Bank Dunia (2010) yang memfokuskan bahwa desentralisasi fiskal sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Pandangan *anti-decentralization* didasarkan pada keterbatasan pemerintah daerah dalam menempatkan dan mengimplementasikan tanggung jawab utama pemerintah daerah. Dalam hal ini yang terjadi adalah desentralisasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oates (1972) dalam Yamoah (2007) berpendapat bahwa desentralisasi fiskal adalah kerugian dalam skala ekonomi, yang dimana dengan sistem desentralisasi, setiap pemerintah daerah harus mengimplementasikan agenda pertumbuhan ekonomi yang independen dari pemerintah daerah lainnya sehingga mungkin akan meningkatkan biaya per unit output layanan karena mereka akan beroperasi pada skala yang lebih kecil.

Prud'homme (1995) berpendapat bahwa desentralisasi akan membuat kebijakan redistribusi akan menjadi lebih sulit, karena kebijakan pemerintah daerah dapat bertentangan dengan kebijakan nasional. Thiessen (2003) berpendapat bahwa kelemahan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal yakni:

- a. Desentralisasi fiskal dapat menyebabkan disparitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi akibat dari adanya perbedaan dalam penyediaan infrastruktur, barang dan jasa publik lainnya sebagai akibat dari tingkat pendapatan dan basis pajak yang berbeda beda antar wilayah, yang dimana daerah kaya akan lebih mampu dalam menyelenggarakan pelayanan publik ketimbang daerah miskin.

- b. Pemerintah daerah cenderung memiliki sumber daya manusia yang terbatas karena menawarkan lebih sedikit kesempatan untuk kemajuan karir dan mungkin gaji yang lebih rendah. Hal ini akan menyebabkan keputusan yang kurang baik, dan meningkatnya pengaruh kelompok berkepentingan sehingga menciptakan suatu kondisi pelayanan publik yang tidak efisien.
- c. Implementasi desentralisasi fiskal di negara kecil dan berpendapatan rendah cenderung tidak menguntungkan karena diperlukan biaya tetap yang tidak sedikit sehingga akan menyerap sebagian besar anggaran yang jumlahnya terbatas.
- d. Desentralisasi fiskal dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang terkait dengan kebijakan stabilisasi yang akan lebih sulit untuk dilakukan.

Kemudian pandangan intermediate-decentralization lebih menekankan pada pentingnya lokasi dan kelembagaan. Lobao dan Kraybill dalam Yamoah (2007) berpendapat bahwa perlu memperhitungkan variasi antar daerah ketika mempelajari peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dan redistribusi. Sehingga pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi akan berbeda antar daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi

daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam upaya menggali dan meningkatkan pendapatan daerahnya sebagai bentuk dari implementasi desentralisasi fiskal.

Kemudian dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya, tiap-tiap pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 8.

Namun, dalam perumusan dan pembuatan setiap peraturan daerah yang akan digunakan sebagai dasar hukum dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, tiap-tiap daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor dan impor sebagaimana tertuang dalam Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 7.

Kompetisi antar pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi yang kemudian akan mendorong efisiensi ekonomi. Oleh karena itu, dengan adanya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang diikuti oleh pendanaan akan

meningkatkan kemampuan daerah dalam menyediakan barang dan jasa publik dengan lebih baik dan lebih efisien, sehingga akan meningkatkan *output* perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Lewis dalam Mulyadi (2003) mengemukakan teorinya mengenai ketenagakerjaan, yaitu; kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja disektor lain.

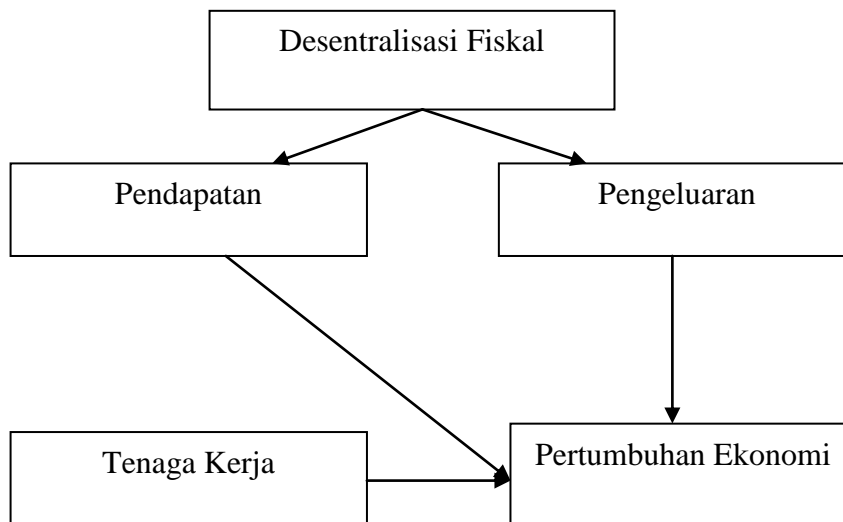
Disisi lain, tenaga kerja dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi.

Sedangkan dari sisi kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti dalam penelitian Lim (1996) menyimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara Jepang dan Korea Selatan dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang berkualitas yang tercermin dalam tingkat melek huruf (*literacy rate*) yang tinggi sehingga tenaga kerja mudah menyerap ilmu dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan ekonomi yang terjadi . Kemudian Akai dan Sakata (2002) yang dimana hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kuantitas dan kualitas dari sumber daya manusia regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika. Sehingga tenaga kerja yang

berkualitas akan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

L. Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi penting untuk mengidentifikasi kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, beberapa variabel yang merupakan determinan pertumbuhan ekonomi yaitu Desentralisasi Fiskal, dan Tenaga kerja. Dengan demikian secara sistematis hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 11. Kerangka Pemikiran

Desentralisasi fiskal akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui efisiensi dalam alokasi sumber daya publik. Menurut Oates (1993) desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi yaitu pemerintah

lokal mempunyai posisi yang lebih baik daripada pemerintah pusat untuk menyalurkan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, yang selanjutnya efisiensi akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi ditingkat nasional.

Indikator desentralisasi fiskal yang sering digunakan menurut Zang dan Zou (1998), untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi yakni meningkatnya belanja pemerintah daerah dibanding belanja pemerintah pusat, dimana tingkat desentralisasi yang kian meningkat ditunjukkan oleh semakin meningkatnya rasio belanja pemerintah daerah terhadap belanja pemerintah pusat.

Akai dan Sakata (2002) juga menggunakan indikator desentralisasi fiskal yakni kemandirian fiskal, hal yang mendasari dari penggunaan indikator ini yaitu suatu daerah mungkin mendapatkan dana perimbangan yang kecil dari pemerintah pusat, namun pendelegasian fiskal di daerah tersebut akan dipandang cukup tinggi jika pemerintah daerahnya mampu membiayai pengeluaran menggunakan pendapatan asli daerah (PAD).

Disisi lain, tenaga kerja dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Menurut Todaro (2006) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi.

M. Hipotesis

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang serta pembentukan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang dapat diajukan dari penelitian ini adalah:

1. Diduga Desentralisasi Fiskal sisi Pengeluaran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera.
2. Diduga Desentralisasi Fiskal sisi Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera
3. Diduga Tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera.
4. Diduga secara bersama sama variabel Independen (Desentralisasi Fiskal sisi Pendapatan, Desentralisasi Fiskal sisi Pengeluaran, dan Tenaga Kerja) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera.

III. METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera. Daerah Provinsi tersebut meliputi 10 Provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Daerah Provinsi yang akan diteliti yakni, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam penelitian ini, akan mengkaji mengenai desentralisasi fiskal, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua sealama kurun waktu tahun 2011 hingga 2015. Data yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu data mengenai desentralisasi fiskal, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2011 sampai tahun 2015.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yakni Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi 2011-2014, Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi 2013-2016, Aceh Dalam Angka Tahun 2011-2016, Sumatera Utara dalam Angka 2011-2016, Riau Dalam Angka 2011-2016, Sumatera Barat Dalam Angka 2011-2016, Jambi Dalam Angka 2011-2016, Sumatera Selatan Dalam Angka 2011-2016, Bengkulu Dalam Angka 2011-2016, Lampung Dalam Angka 2011-2016, Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2011-2016, dan Kepulauan Riau Dalam Angka 2011-2016. Metode pengumpulan data dengan menggunakan, metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data Pendapatan Asli Daerah, Total Pendapatan Daerah, Pengeluaran Daerah, Pengeluaran Pemerintah Pusat, dan Tenaga Kerja yang dilakukan dengan mengambil data dari berbagai dokumentasi atau publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

C. Variabel Operasional dan Pengukurannya

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 2010 dengan formula :

$$PE = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

PE : Pertumbuhan Ekonomi (%)
 PDRB_t : Produk Domestik Regional Bruto tahun berjalan
 PDRB_{t-1} : Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya

dan dinyatakan dalam bentuk satuan persen (%) yang kemudian disebut

PE.

2. Desentralisasi Fiskal Pengeluaran

Variabel desentralisasi fiskal yang digunakan dalam penelitian ini merupakan indikator desentralisasi fiskal yang digunakan oleh Zang dan Zou (1998). Variabel indikator pengeluaran dalam penelitian ini dinotasikan menjadi RPN. RPN merupakan rasio pengeluaran pemerintahan Provinsi terhadap total pengeluaran pemerintah pusat dalam bentuk persentase (%).

3. Desentralisasi Fiskal Pendapatan

Variabel desentralisasi fiskal yang digunakan dalam penelitian ini merupakan indikator desentralisasi fiskal yang juga digunakan oleh Akai dan Sakata (2002) yakni kemandirian fiskal yang diukur dengan Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Variabel kemandirian fiskal dalam penelitian ini dinotasikan menjadi RK yang diukur dalam bentuk persentase (%).

4. Tenaga Kerja

Variabel tenaga kerja yang digunakan dalam penelitian ini merupakan rasio tenaga kerja yang juga digunakan oleh Akai dan Sakata (2002) yakni rasio lulusan SMA/Sederajat terhadap penduduk usia kerja. Tenaga kerja yang memiliki ijazah SMA/Sederajat menunjukkan tingkat kualitas sumber daya manusia yang lebih baik karena lebih cepat dalam proses penyerapan teknologi, sehingga akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Variabel tenaga kerja dalam penelitian ini dinotasikan menjadi RTK yang diukur dalam bentuk persentase (%).

D. Analisis Data

1. Model Analisis

a. Data Panel

Data panel adalah kombinasi dari data *time series* dan *cross-section* (Ekananda, 2016). Data *time series* merupakan data yang disusun berdasarkan urutan waktu, seperti data harian, bulanan, kuartalan atau tahunan, sedangkan data *cross-section* merupakan data yang dikumpulkan pada waktu yang sama dari beberapa daerah, perusahaan atau perorangan (Gujarati, 2012).

Penggabungan kedua jenis data *time series* yaitu data periode waktu dan data *cross-section* yaitu data unit perusahaan, daerah dan perorangan disebut dengan data panel (Gujarati, 2012). Jika terdapat jumlah observasi *time series* dari unit *cross-section* yang sama maka ini disebut panel seimbang (*balanced panel*), sedangkan jika jumlah observasi *time series* dari unit *cross-section* tidak sama maka disebut panel tidak seimbang (*unbalanced panel*) (Gujarati, 2012). Dalam penelitian ini menggunakan panel seimbang (*balanced panel*) karena periode *time series* selama lima tahun dengan data *cross-section* sebanyak sepuluh daerah.

Menurut Gujarati (2012), penggunaan metode data panel pada dasarnya memiliki beberapa keunggulan antara lain:

1. Data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu.

2. Data panel lebih banyak memberi informasi, lebih banyak variasi, sedikit kolinearitas antar variabel, lebih banyak *degree of freedom*, dan lebih efisien.
3. Data panel cocok untuk mempelajari dinamika perubahan.
4. Data panel paling baik untuk mendeteksi dan mengukur dampak secara sederhana.
5. Data panel memudahkan untuk mempelajari model yang rumit.
6. Data panel dapat meminimumkan bias karena data berjumlah besar.

Secara umum model regresi data panel adalah sebagai berikut (Baltagi (2005) dalam Ekananda (2016):

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta \chi_{it} + \mu_{it}, i = 1, \dots, N \text{ dan } t = 1, \dots, T \quad \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

Y_{it} = variabel respon pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t

α_i = intersep

χ_{it} = variabel prediktor pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t

β = koefisien slope

μ_{it} = galat atau komponen error pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t

b. Model Pendekatan Data Panel

Dalam analisis model data panel terdapat 3 metode pendekatan yang terdiri dari common effect, fixed effect, dan random effect. Ketiga pendekatan yang dilakukan dalam analisis data panel dapat dijelaskan sebagai berikut (Ekananda, 2016):

1. Pendekatan *Common Effect*

Teknik ini tidak ubahnya dengan membuat regresi dengan data *cross section* atau time series. Akan tetapi, untuk data panel, sebelum membuat regresi kita harus menggabungkan data *cross-section* dengan data time series (pool data). Kemudian data gabungan ini diperlakukan sebagai suatu kesatuan pengamatan untuk mengestimasi model dengan metode OLS. Metode ini dikenal dengan estimasi *Common Effect*. Akan tetapi, dengan menggabungkan data, maka kita tidak dapat melihat perbedaan baik antar individu maupun antar waktu. Atau dengan kata lain, dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Pendekatan ini dapat ditulis dengan persamaan berikut ini:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it} ; t=1, \dots, T, i=1, \dots, N \dots \dots \dots (2)$$

Pendekatan ini mempunyai asumsi bahwa nilai intersep dan koefisien *slope* adalah sama atau konstan untuk setiap periode maupun antar individu. Pendekatan ini tidak dapat melihat perubahan individu karena seluruh individu dianggap sama atau homogen.

2. Pendekatan *Fixed Effect*

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa intersep maupun slope adalah sama baik antar waktu maupun antar perusahaan. Namun, asumsi ini jelas sangat jauh dari kenyataan sebenarnya. Adanya variabel-variabel yang tidak semuanya masuk dalam persamaan model memungkinkan adanya intercept yang tidak konstan. Atau dengan kata lain, intercept ini mungkin berubah untuk setiap individu dan waktu. Pemikiran inilah yang menjadi dasar pemikiran pembentukan model tersebut. Pendekatan ini dapat ditulis dengan persamaan berikut ini:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it} \quad \dots\dots\dots(3)$$

Dimana nilai intersep untuk masing-masing unit *cross section* dapat ditulis sebagai berikut:

$$\alpha_i = \alpha + \mu_i; i = 1, 2, \dots, N \dots\dots\dots (4)$$

Dimana μ_i adalah *unobservable individual effects*. Persamaan (3) dapat juga ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_n X_{nit} + \mu_i + \varepsilon_{it} \quad \dots\dots\dots(5)$$

Dalam pendekatan ini, μ_i diasumsikan berkorelasi dengan regressor X atau dapat dikatakan bahwa μ_i bersifat tidak random.

3. Pendekatan *Random Effect*

Bila pada Model Efek Tetap, perbedaan antar-individu dan atau waktu dicerminkan lewat intercept, maka pada Model Efek Random, perbedaan tersebut diakomodasi lewat error dari suatu model. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang time series dan cross section.

Pendekatan ini dapat ditulis dengan persamaan berikut ini:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_n X_{nit} + w_{it} \dots\dots\dots (6)$$

Error term sekarang adalah w_{it} yang terdiri dari u_i dan e_{it} , dimana u_i adalah *cross section (random) error component*, sedangkan e_{it} adalah *combined error component*, sehingga pendekatan efek acak ini sering disebut *Error Component Model (ECM)*. Persamaan (6) dapat dimodifikasi menjadi:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_n X_{nit} + u_i + e_{it} \dots\dots\dots (7)$$

Perbedaan mendasar antara FEM dan REM adalah asumsi mengenai *unobservable individual effects* (u_i) dimana REM mengasumsikan u_i bersifat *random* atau tidak berkorelasi dengan *regressor X*.

c. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel

1. Uji Chow

Uji ini menggunakan salah satu model pada regresi data panel, yaitu antara model efek tetap (*fixed effect model*) dengan model *common* (*common effect model*). Prosedur dari pengujian ini menurut Baltagi (2005) dalam Ekananda (2016):

H_0 = Metode *Fixed Effect* lebih Sesuai

H_a = Metode *Common Effect* lebih sesuai

Statistik uji yang digunakan yakni uji F yaitu:

$$F_{hitung} = \frac{(RRSS - URSS)/(n-1)}{URSS/(nt-n-k)}$$

Keterangan:

n = jumlah individu (*cross section*)

T = jumlah periode waktu (*time series*)

K = jumlah variabel penjelas

RRSS = *restricted residual sums of squares* yang berasal dari model koefisien tetap

URSS = *unrestricted residual sums of squares* yang berasal dari model koefisien tetap

Jika nilai $F_{hitung} > \text{nilai } F_{(n-1, nT-n-k)}$ atau $p\text{-value} < \alpha$ (taraf signifikansi/alpha), maka tolak hipotesis awal (H_0) sehingga model yang terpilih adalah *fixed effect*. Sebaliknya Jika nilai $F_{hitung} < \text{nilai } F_{(n-1, nT-n-k)}$ atau $p\text{-value} > \alpha$ (taraf signifikansi/alpha), maka terima hipotesis awal (H_0) sehingga model yang terpilih adalah *common effect*.

2. Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk memilih model efek acak (*random effect model*) dengan model efek tetap (*fixed effect model*). Uji ini bekerja dengan menguji apakah terdapat hubungan antara galat pada model (galat komposit) dengan satu atau lebih variabel penjelas (independen) dalam model. Hipotesis awalnya adalah tidak terdapat hubungan antara galat model dengan satu atau lebih variabel penjelas. Prosedur pengujiannya Widarjono (2013), Gujarati (2015), Ekananda (2016) sebagai berikut:

$H_0 = \text{Metode } Random\ Effect \text{ lebih sesuai}$

$H_a = \text{Metode } Fixed\ Effect \text{ lebih sesuai}$

Statistik Hausman mengikuti distribusi statistik Chi-Square dengan degree of freedom sebanyak variabel bebasnya berdasarkan kriteria *Wald* yakni:

$$W = \alpha' [\text{var}(\alpha')]^{-1} \alpha$$

$$W = (\beta_{MET} - \beta_{MEA})' [\text{var}(\beta_{MET} - \beta_{MEA})]^{-1} (\beta_{MET} - \beta_{MEA})$$

Keterangan:

β_{MET} = vektor estimasi slope model efek tetap

β_{MEA} = vektor estimasi slope model acak

Jika hasil pengujian diperoleh Chi-Square hitung $>$ Chi Square tabel, dan p value signifikan maka hipotesis H_0 ditolak sehingga metode *fixed effect* lebih tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Sebaliknya jika Chi Square hitung $<$ Chi tabel dan p value tidak signifikan, maka hipotesis H_0 diterima sehingga model acak atau *random effect model* (REM) lebih baik digunakan dalam mengestimasi data panel.

d. Estimasi Model Regresi Data Panel

Penelitian mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera, menggunakan data time series selama 5 tahun mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dan data cross-section sebanyak 10 data mewakili Provinsi di Pulau Sumatera. Kombinasi antara kedua data tersebut menjadi data panel menghasilkan 50 observasi.

Berdasarkan model regresi data panel menurut Baltagi (2005) dalam Ekananda (2016) pada halaman 64, maka model regresi data panel dalam penelitian ini adalah:

$$PE_{it} = \alpha_i + \beta_1 RPN_{it} + \beta_2 RK_{it} + \beta_3 RTK_{it} + \mu_{it} \quad (8)$$

Keterangan:

PE	: Pertumbuhan Ekonomi (%)
RPN	: Rasio Pengeluaran (%)
RK	: Rasio Kemandirian (%)
RTK	: Rasio Tenaga Kerja (%)
α_i	: Intersep
$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_4$: Koefisien Regresi variabel bebas
μ_{it}	: Komponen eror di waktu t untuk unit cross-section
i	: 1,2,...,10 (data cross-section Provinsi di Sumatera)
t	: 1,2,...,5 (data time series, tahun 2011-2015)

2. Pengujian Data

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan agar hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala multikolinieritas, normalitas, autokolerasi dan heteroskedastisitas. Model regresi ini digunakan agar dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) yakni tidak terdapat multikolinieritas, autokolerasi, normalitas dan heteroskedastisitas. Apabila model yang digunakan terjadi multikolinieritas, autokolerasi, normalitas dan heteroskedastisitas maka regresi penaksir tidak efisien, peramalan berdasarkan regresi tersebut akan bias dan uji baku yang umum untuk koefisien regresi menjadi tidak valid (Gujarati, 2010).

Data panel memiliki keuntungan seperti dimungkinkannya estimasi masing-masing karakteristik individu maupun karakteristik menurut waktu secara terpisah. Dengan suatu data antar waktu saja, parameter yang didapat adalah

parameter antar waktu persamaan tersebut, sementara data antar individu akan memberikan parameter antar individu saja. Dengan menerapkan proses estimasi data panel kedalamnya, maka secara bersamaan akan dapat diestimasi karakteristik individu yang mencerminkan dinamika antar waktu masing-masing variabel bebas tersebut, dengan begitu analisis hasil estimasi akan lebih komprehensif dan mencakup hal-hal yang lebih mendekati realita (Ekananda, 2016).

Di dalam model persamaan regresi linear klasik (classical linear regression model), gangguan (error terms) selalu dinyatakan bersifat homokedastic dan serially uncorrelated. Dengan begitu, penggunaan metode ordinary least square akan menghasilkan penduga yang bersifat best linear unbiased. Namun demikian, asumsi gangguan tersebut tidak dapat diterapkan pada data panel (Ekananda, 2016).

Data panel yang tersusun atas beberapa individu untuk beberapa periode, membawa masalah baru dalam sifat gangguan tersebut. Masalah tersebut adalah karena gangguan (disturbances atau error terms) yang kini menjadi tiga macam, yaitu gangguan antar waktu (time series related disturbances) dan gangguan yang berasal dari keduanya (Ekananda, 2016).

b. Uji Hipotesis

1. Uji t (Uji Keberartian Parsial)

Uji signifikansi secara parsial atau uji-t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tak bebas (Widarjono, 2007). Pengujian terhadap masing-masing koefisien regresi parsial dengan menggunakan uji t apabila besarnya varians populasi tidak diketahui, sehingga pengujian hipotesisnya sangat ditentukan oleh nilai-nilai statistiknya.

Hipotesa Uji-t adalah:

H_0 = koefisien regresi parameter tidak berpengaruh

H_a = koefisien regresi parameter berpengaruh dan signifikan

Untuk menentukan apakah menolak atau menerima hipotesis tersebut, pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai hasil uji (t-statistik) dari hasil regresi dengan t-tabel yang diperoleh dari tabel Distribusi Normal standar T, yaitu:

- a. Jika T-statistik $< T$ tabel $(-t(\alpha/2))$ atau T-statistik $> T$ tabel $(t(\alpha/2))$, maka H_0 ditolak yang berarti bahwa secara statistik variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika T -tabel $(-t(\alpha/2)) \leq T$ -statistik $\leq T$ tabel $(t(\alpha/2))$ maka H_0 diterima yang berarti bahwa secara statistik variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian ini dilakukan dengan rumus (Widarjono, 2007):

$$t_i = \frac{(\beta_i)/(\beta_1)}{se(\beta_i)}$$

Adapun hipotesis yang digunakan yaitu proses pengujian secara parsial dari Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera seperti pada hipotesis yang dikemukakan di halaman 69 adalah:

1. $H_0 : \beta_1 = 0$, artinya variabel Rasio Pengeluaran (RPN) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2011 - 2015.
 $H_a : \beta_1 \neq 0$, artinya variabel Rasio Pengeluaran (RPN) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2011 - 2015.
2. $H_0 : \beta_2 = 0$, artinya variabel Rasio Kemandirian (RK) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2011 - 2015.
 $H_a : \beta_2 \neq 0$, artinya variabel Rasio Kemandirian (RK) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2011 - 2015.
3. $H_0 : \beta_3 = 0$, artinya variabel Rasio Tenaga Kerja (RTK) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2011 - 2015.
 $H_a : \beta_3 \neq 0$, artinya variabel Rasio Tenaga Kerja (RTK) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2011 - 2015.

Bila t hitung $< t$ tabel ($-t(\alpha/2)$) atau t hitung $> t$ tabel ($t(\alpha/2)$) ($\alpha = n - k$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti variabel Desentralisasi Fiskal (RPN dan

RK), dan RTK secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi. Bila $t \text{ tabel } (-t(\alpha/2) \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel } (t(\alpha/2) (\alpha = n - k))$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti tiap-tiap variabel bebas (Desentralisasi Fiskal (RPN dan RK), dan RTK) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi). Sedangkan dalam penelitian digunakan pengujian parsial t statistik yang biasa dilihat pada tingkat signifikansi pada hasil pengolahan data.

2. Uji F (Keberartian Keseluruhan)

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara keseluruhan dilakukan dengan uji F. Kesimpulan uji F dapat diperoleh dengan membandingkan antara F statistik dengan F tabel pada tingkat tertentu dan derajat bebas tertentu (Widarjono, 2007). Pengujian ini dilakukan dengan formula Hipotesis sebagai berikut :

1. $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3, = 0$, berarti variabel independen (Rasio Pengeluaran, Rasio Kemandirian dan Rasio Tenaga Kerja) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi).
2. $H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$, berarti variabel independen (Rasio Pengeluaran, Rasio Kemandirian dan Rasio Tenaga Kerja) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi).

Pengujian dapat dilakukan dengan rumus (Widarjono, 2007):

$$F = \frac{ESS/K}{RSS/(N-K-1)}$$

Bila F hitung $> F$ tabel ($\alpha = n - k - 1$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat. Bila F hitung $< F$ tabel ($\alpha = n - k - 1$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti secara bersama-sama variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

c. Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan kemampuan variabel-variabel bebasnya dalam menjelaskan perubahan variabel tak bebasnya. Nilai koefisien determinasi yang baik adalah yang semakin mendekati 1, karena akan berarti kesalahan pengganggu dalam model yang digunakan semakin kecil (Widarjono, 2005). Dua sifat R^2 adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan besaran positif.
- b. $0 \leq R^2 \leq 1$

Nilai R^2 terletak pada $0 \leq R^2 \leq 1$, suatu nilai R^2 mendekati 1 yang artinya modelnya semakin baik. Apabila nilai dari R^2 sebesar 1 berarti kemampuan variabel-variabel bebasnya mampu menjelaskan secara sempurna perubahan variabel tak bebasnya. Sebaliknya jika nilai dari R^2 sebesar 0 berarti variabel-variabel bebasnya tidak mampu menjelaskan perubahan variabel tak bebasnya (Widarjono, 2005).

d. Interpretasi Koefisien Data Panel

Model regresi data panel dengan pendekatan model *fixed effect* dan *random effect*, dapat menjelaskan efek individu dari setiap cross-section antar waktu. Berbeda dengan pendekatan *common effect* yang tidak terdapat efek individu dari setiap cross-section antar waktu (Ekananda, 2016).

Efek individu dari setiap *cross-section* antar waktu bisa menghasilkan nilai koefisien yang berbeda-beda antar setiap *cross-section*, nilai koefisien tersebut bisa negatif atau positif tergantung dari interpretasi karakteristik individu. Nilai dari koefisien model *fixed effect* dan *random effect* menjelaskan mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat di setiap unit *cross-section* antar waktu (Ekananda, 2016).

E. Gambaran Umum

1. Geografis

Secara geografis, Pulau Sumatera terletak antara 6° Lintang Utara - 6° Lintang Selatan dan 95° Bujur Barat - 109° Bujur Timur dengan luas wilayah 443.065,8 km² yang memiliki perbatasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Benggala
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia

Di bagian barat pulau, terbentang pegunungan Bukit Barisan yang membujur dari barat laut ke arah tenggara dengan panjang kurang lebih 1650 km. Sepanjang bukit barisan tersebut terdapat puluhan gunung baik aktif maupun tidak aktif. Di Pulau Sumatera juga terdapat beberapa danau dan sungai.

2. Administratif

Secara administratif, pemerintahan di Pulau Sumatera terbagi atas 10 Provinsi.

Berikut adalah tabel daerah otonom tingkat Provinsi di Sumatera:

Tabel 1. Daerah Otonomi tingkat Provinsi di Pulau Sumatera

PROVINSI	Undang-Undang Pembentukan
Nangroe Aceh Darussalam	Nomor 24 Tahun 1956
Sumatera Utara	Nomor 24 Tahun 1956
Sumatera Barat	Nomor 61 Tahun 1958
Riau	Nomor 61 Tahun 1958
Jambi	Nomor 61 Tahun 1958
Sumatera Selatan	Nomor 25 Tahun 1959
Lampung	Nomor 14 Tahun 1964
Bengkulu	Nomor 9 Tahun 1967
Bangka Belitung	Nomor 27 Tahun 2000
Kepulauan Riau	Nomor 25 Tahun 2002
Sumber:	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri, data diolah

Berdasarkan Tabel 1. Pulau Sumatera terbagi atas 10 daerah Provinsi dimana provinsi yang pertama terbentuk adalah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, kemudian bertambah 3 Provinsi Baru yakni Sumatera barat dan Riau sehingga menjadi 5 daerah pemerintahan pada tahun 1958. Setahun kemudian muncul kembali wilayah pemekaran baru yakni Sumatera Selatan, lalu diikuti oleh Lampung 5 tahun kemudian, dan setahun setelah lampung adalah

Bengkulu yang menjadi wilayah pemekaran baru. Pemekaran wilayah pemerintah daerah Provinsi selanjutnya terjadi dalam waktu yang sangat lama yakni 36 tahun kemudian yaitu Provinsi Bangka Belitung.

Awal pelaksanaan desentralisasi fiskal di Sumatera secara otomatis hanya dilakukan oleh 9 Provinsi yang dimana pelaksanaan desentralisasi fiskal baru efektif dilaksanakan mulai 1 Januari 2001. Kemudian setahun setelah pelaksanaan desentralisasi barulah muncul Provinsi baru yakni Provinsi Kepulauan Riau yang terbentuk pada tahun 2002.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan terkait tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Desentralisasi Fiskal sisi Pengeluaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2011-2015.
2. Desentralisasi Fiskal sisi Pendapatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2011-2015.
3. Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2011-2015.
4. Desentralisasi Fiskal (Rasio Pengeluaran dan Rasio Kemandirian), dan Tenaga Kerja yang diproyeksikan dengan Rasio Tenaga Kerja Berijazah SMA/Sederajat (RTK) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2011-2015.

B. Saran

Dari berbagai kesimpulan yang telah dirangkum, sebagai masukan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera harus lebih mempertajam alokasi belanja untuk mendukung pembangunan infrastruktur, melakukan penghematan anggaran yang kurang produktif, penerapan *reward* dan *punishment* dalam pengalokasian anggaran.
2. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah guna mencapai kemandirian daerah yang lebih baik, pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera harus meningkatkan pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan menambah objek pajak, subjek pajak, menaikkan tarif pajak tertentu seperti pajak kendaraan bermotor dengan memberlakukan peraturan daerah sebagai payung hukum dalam pelaksanaannya.
3. Dalam hal ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera perlu menerapkan strategi dalam meningkatkan tenaga kerja yang memiliki ijazah SMA/Sederajat. Strategi tersebut seperti memperbaiki fasilitas pendidikan, memberikan program beasiswa, menerapkan dan melakukan sosialisasi mengenai program pendidikan gratis, dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito dan Andie Megantara. 2009. *Era Baru Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Akai, Nobou, dan Masayo Sakata. 2002. Fiscal Decentralization Contributes To Economic Growth: Evidence From State-Level Cross-Section Data For The United States. *Journal Of Urban Economics* 52 (2002) 93-108.
- Akai, Nobou, Yukihiro Nishimura dan Masayo Sakata. 2007. Complementarity, Fiscal Decentralization, and Economic Growth. *Journal Economic of Governance*. 8: 339-362.
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan edisi kelima*. STIM YKPN, Yogyakarta.
- Badan Analisa Fiskal. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Fiskal*. Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2011-2015. *Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah*. BPS Provinsi Lampung, Lampung.
- Badan Pusat Statistik. 2011-2015. *Kompilasi Provinsi Dalam Angka*. BPS Provinsi Lampung, Lampung.
- Badrudin, Rudi. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Baltagi, Badi H. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data*. John Wiley and Sons Ltd, England.
- Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*. Erlanga, Jakarta.
- Basri, Faisal dan Haris Munandar. 2009. *Lanskap Ekonomi Indonesia : Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE, Yogyakarta.

- BPEKKI DEPKEU. 2006. *Evaluasi Mekanisme Pencairan Dana Perimbangan*. DEPKEU RI, Jakarta.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Davoodi, Hamid dan Heng-fu Zou. 1998. Fiscal decentralization and Economic growth : A cross-country study. *Journal of Urban Economic*, 43: 244-257.
- Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Dumairy. 2001. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga, Jakarta.
- Faridi, Muhammad Zahir. 2011. Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth : Evidence from Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)* Volume 31, Nomor 1: 1-13.
- Gorgi, Ebrahim dan Masomeh Alipourian. 2008. Trade Openness and Economic Growth In Iran, and some OPEC Nation. *Iranian Economic Review Volume 13, Nomor 22*.
- Gujarati, Damodar N dan Dawn C.Porter. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 2*. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Hammond, George.W dan Mehmet S. Tosun. The Impact of Local Decentralization on Economic Growth: Evidence from U.S. Counties. *Discussion Paper Series*. IZA DP Nomor 4574.
- Kementerian Dalam Negeri. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2013. *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal*.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2008. *Desentralisasi Fiskal Politik Dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan Edisi 5*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. *Journal of Economic Development and Cultural Change*.
- Lincoln, Arsyad. 2010. Ekonomi Pembangunan Edisi 5. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Malarangeng, Andi Alfian. 2001. *Otonomi Daerah : Perspektif Teoritis dan Praktis*. Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1998. *Ekonomi Publik Edisi 3*. BPFE, Yogyakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 1960. *TAP MPR Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969*.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 1998. *TAP MPR Nomor 25/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagaian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan RI*.
- Mankiw, N.Gregory. 2003. *Teori Makroekonomi edisi kelima*. Erlangga, Jakarta.
- Mishkin, Frederic S. 2009. *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Noor, Henry Faizal. 2013. *Ekonomi Publik : Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat*. Akademia Permata, Padang.
- Oates, Wallace E. 1993. Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal, Volume 2 Nomor 46 Hal: 237*.
- Patonov, Nikolay. 2013. Decentralization on Public Spending and Economic Growth : An Emperical Study on The Eropean Union. *Journal of International Relations* Volume X1: 5-15.
- Pemerintah Provinsi Aceh. 2012. *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Aceh*.
- Pemerintah Provinsi Aceh. 2014. *Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Umum*.
- Pemerintah Provinsi Aceh. 2014. *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Usaha*.
- Pemerintah Provinsi Aceh. 2014. *Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Tertentu*.

- Pemerintah Provinsi Bengkulu. 2011. *Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu.*
- Pemerintah Provinsi Bengkulu. 2014. *Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu.*
- Pemerintah Provinsi Bengkulu. 2015. *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.*
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 2011. *Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.*
- Pemerintah Provinsi Riau. 2011. *Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.*
- Pemerintah Provinsi Riau. 2013. *Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pajak Rokok.*
- Pemerintah Provinsi Riau. 2015. *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.*
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.*
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.*
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 2011. *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.*
- Prud'homme, R. 1994. On the Dangers of Decentralization. Policy Research Working Paper 1252. World Bank, Washington D.C.
- Rahayu, Ani Sri. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal.* Bumi Aksara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.*
- Republik Indonesia. 1948. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.*

- Republik Indonesia. 1950. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Timur.*
- Republik Indonesia. 1956. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Keuangan Daerah.*
- Republik Indonesia. 1957. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Otonomi Daerah.*
- Republik Indonesia. 1959. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat Dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri, Dan Penyerahan Keuangannya Kepada Pemerintah Daerah.*
- Republik Indonesia. 1965. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.*
- Republik Indonesia. 1968. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah.*
- Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.*
- Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.*
- Republik Indonesia. 1995. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan.*
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.*
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah*.
- S, Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saragih, Panglima Juli. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sasana, Hadi. 2011. Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Volume 18 Nomor 1, Maret 2011.
- Soepangat, Edi dan Haposan Lumban Gaol. 1991. *Pengantar Ilmu Keuangan Negara*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sukirno, Sadono.2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses Masalah dan dasar kebijakan, cetakan Ketiga*. Kencana, Jakarta.
- Sukirno, Sadono.2009. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suliswanto, Muhammad Sri Wahyudi. 2016. Tingkat Keterbukaan Ekonomi di Negara ASEAN-5. *Neo-Bis, Volume 10 Nomor 22*.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Thiessen, Ulrich. (2003). Fiscal Decentralization and Economic Growth in High Income OECD Countries. *Fiscal Studies* Vol. 24 No.3.
- Todaro, Michael P dan Smith Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi, Edisi 9*. Erlangga, Jakarta.
- Ugochukwu, Ugwuegbe S dan Uruakpa Peter Chinyere. 2013. The Impact of Capital Formation on The Growth of Nigerian Economy. *Journal of Finance and Accounting. Volume 4 Numberr 9*.
- Universitas Lampung. 2014. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Unila, Bandar Lampung.
- Wibowo, Puji. (2008). Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Keuangan Publik*.

Widarjono, Agus. 2007. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Ekonisia, Yogyakarta.

Woller. Gary M dan Kerk Phillips. 1998. Fiscal Decentralization and LDC Economic Growth: An Emperical Investigation. *Journal of Development Studies* : 139.

Yamoah, Afia Boadiwa. 2007. The Effect Of Fiscal Decentralization On Economic Growth In U.S. Counties. *Dessertation*, The Ohio State University.

Zhang, Tao dan Heng-Fu Zou. 1998. Fiscal Decentralization, Public Spending and Economic Growth in China. *Journal Of Public Expenditure*, 67: 221-240.